

**“CACAT BADAN SEBAGAI ALASAN POLIGAMI PERSPEKTIF DOSEN  
FAKULTAS SYARI’AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG”**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana dalam ilmu Hukum

**Oleh**

**Tama Yudha Wiguna**

**NPM : 1421010054**

**JURUSAN : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah**

**FAKULTAS SYARI’AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**1440 H / 2018 M**

## ABSTRAK

Cacat badan ialah salah satu alasan yang dapat dijadikan bagi suami untuk mengajukan permohonan poligami, sebagaimana yang telah tertulis dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974. Yang berbunyi: a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Pemikiran serta pendapat dosen fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung terkait cacat badan sebagai alasan poligami berbeda antara satu dengan lainnya, dikarenakan para dosen yang menjadi narasumber dalam permasalahan ini mereka memiliki sudut pandang yang berbeda-beda ada yang memandang secara pro dan ada pula yang kontra terhadap permasalahan cacat badan sebagai alasan poligami.

Permasalahan dalam penelitian yaitu: Bagaimana pendapat dosen fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung tentang cacat badan sebagai alasan poligami. Tujuan melakukan penelitian ini untuk mengetahui tanggapan dosen-dosen fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung mengenai cacat badan sebagai alasan poligami dalam hubungan rumah tangga.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah lapangan (*field reserch*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu, baik lembaga-lembaga organisasi masyarakat maupun lembaga pemerintahan. Setelah data terkumpul, maka dilakukan analisis dengan metode analisis kualitatif, yang menekankan pada teknik pengambilan sample dengan cara sample bertujuan (*purposive sampling*) yaitu mengambil beberapa orang untuk dijadikan sample dengan asumsi bahwa sample tersebut dapat menguasai permasalahan-permasalahan yang ada khususnya dalam ilmu Hukum Keluarga.

Berdasarkan data analisis, dapat disimpulkan bahwa cacat badan sebagai alasan poligami perspektif dosen fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung, poligami merupakan hal yang diperbolehkan baik secara hukum agama Islam dan hukum positif di Indonesia, secara pelaksanaan, ketentuan dan peraturannya telah diatur dalam Al-Quran dan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, dengan tidak menyampingkan asas pernikahan di Indonesia yang menganut paham asas pernikahan monogami. Karena poligami bukan merupakan anjuran melainkan toleransi atau jalan alternatif dalam hubungan rumah tangga. Terkait cacat badan yang dapat dijadikan alasan bagi suami untuk mengajukan permohonan poligami ini ialah cacat badan yang dapat menghalangi serta mengganggu keharmonisan dalam hubungan rumah tangga, sehingga menyebabkan menghalangi seorang isteri untuk melakukan tugas, fungsi, peran, dan kewajibannya kepada suami sebagai seorang isteri.





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp(0721)703260*

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **Cacat Badan Sebagai Alasan Poligami Perspektif Dosen  
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan  
Lampung**  
Nama Mahasiswa : **Tama Yudha Wiguna**  
NPM : **1421010054**  
Jurusan : **Al-Ahwal Al-Syakhshiyah**  
Fakultas : **Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk di Munaqasyahkan dan Dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas  
Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Drs. H. Haryanto H, M.H.**  
**NIP. 195612051983031002**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H**  
**NIP. 196908081993032002**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah**

**Marwin, S.H., M.H.**

**NIP. 197501292000031001**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmijn Sukarama Bandar Lampung 35131 Telp.(0721)703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: **"CACAT BADAN SEBAGAI ALASAN POLIGAMI  
PERSPEKTIF DOSEN FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG"** disusun oleh: **Tama Yudha Wiguna,  
NPM. 1421010054, Program Studi: Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,** telah diujikan  
dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan  
Lampung, pada hari/tanggal: Selasa, 11 Desember 2018.

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua : Marwin, S.H., M.H.**

**Sekretaris : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.**

**Penguji I : Dr. Jayusman, M.Ag.**

**Penguji II : Drs. H. Haryanto H, M.H.**



**DEKAN : Nuzuliyah, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197009011997031002**



## MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ  
وَرُبْعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ٣

*Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya(3).<sup>1</sup>*



---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1996), hlm. 61.

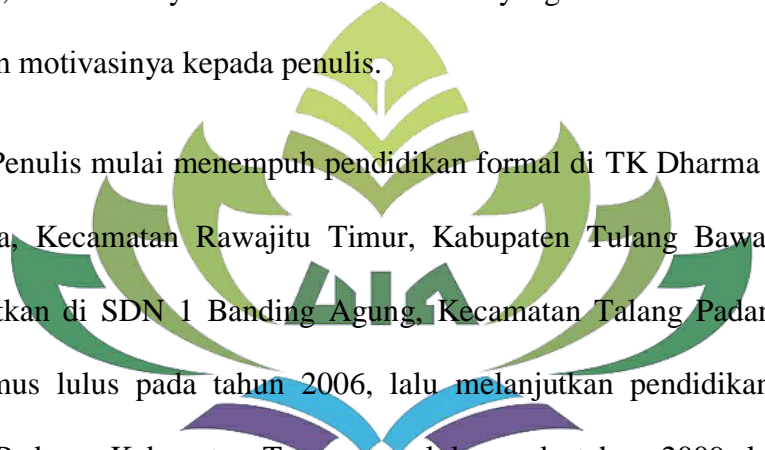
## PERSEMBAHAN

Dengan Penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan kuasa-Nya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini, sehingga dengan rahmat-Nya karya ini dapat terselesaikan. Skripsi ini peneliti persembahkan dengan penuh kasih sayang kepada:

1. Ayahanda Yakub dan Ibunda Dahniar tercinta yang telah melindungi, mengasuh, mendidik, selalu menyayangi dan merawat saya sejak dari kandungan hingga dewasa. Serta senantiasa mendo'akan dan sangat mengharapkan keberhasilan saya. Berkat do'a restu keduanya sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan ini. Semoga semua ini merupakan salah satu hadiah yang terindah untuk kedua orangtua saya.
2. Adik-adikku tersayang, Alm. Rama Adiguna, Gandanu Jayadi, Dinda Salsabila yang selalu memberikan semangat untuk mendorong akan keberhasilan saya selama menempuh studi ini.
3. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## RIWAYAT HIDUP

Tama Yudha Wiguna lahir di Pringsewu Kabupaten Tanggamus, pada tanggal 14 Oktober 1994. Anak Pertama dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Yakub dan Ibu Dahniar. Penulis dilahirkan dari sosok orang tua yang sederhana, sosok yang luar biasa dalam hidup ini dengan penuh kasih sayang yang tulus merawat, membesarkan, mendidik dan mendoakan anak-anaknya, sehingga penulis bisa berguna untuk banyak orang, dan ketiga saudaraku Alm. Rama Adiguna, Gandanu Jayadi dan Dinda Salsabila yang selalu memberikan semangat, do'a, dan motivasinya kepada penulis.



Penulis mulai menempuh pendidikan formal di TK Dharma Wanita, Bumi Dipasena, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang, kemudian melanjutkan di SDN 1 Banding Agung, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus lulus pada tahun 2006, lalu melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Talang Padang, Kabupaten Tanggamus lulus pada tahun 2009, lalu pendidikan selanjutnya di Pondok Modern Darusallam Gontor, Desa Mlarak, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur lulus pada tahun 2013.

Pada tahun 2014, penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr.Wb*

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga sampai saat ini penulis diberikan kesehatan, kemudahan, serta kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul:

“Cacat Badan Sebagai Alasan Poligami Perspektif Dosen Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung” Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ungkapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Yang selalu memotivasi mahasiswa untuk menjadi pribadi yang berkualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.
2. Dr. Alamsyah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



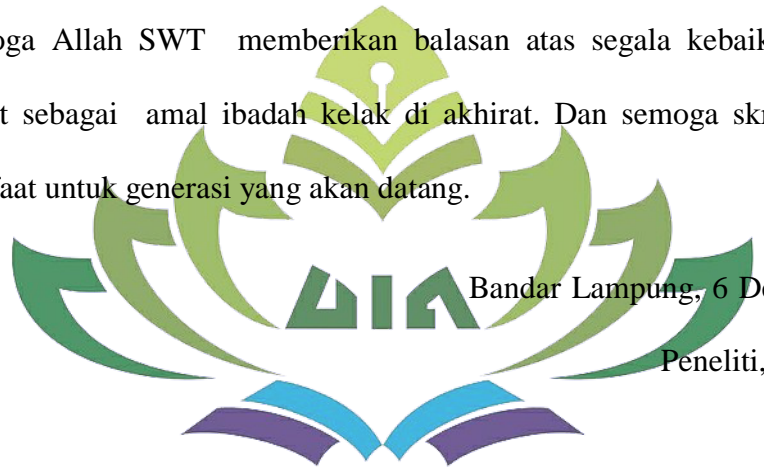
3. Drs. H. Haryanto H, M.H. selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, dan arahan dengan penuh rasa sabar serta saran dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku pembimbing II yang telah sabar dan memberi segala arahan dalam penulisan skripsi.
5. Bapak Marwin, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsyah dan Bapak Gandhi Liyorba Indra, M.Ag. selaku Sekretaris Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsyah yang telah memberikan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen-dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan motivasi serta ilmu yang bermanfaat.
7. Staf-staf akademik Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan informasi dan data penelitian.
8. Teman seperjuangan Al-Ahwal Al-Syakhsyah angkatan 2014, terkhusus untuk kelas A Soleh Adhari, Hendra Agustiawan, Bagus Permadi, Picesa Parawaika, Age Surya Dwipa Chandra, Deri Ismedi, Dika Apriliansyah, M Dewo Romadhon, Muhammad Hendro, Riski Setiawan, Audia Pramudita, dan semua teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas semangat, canda dan tawa yang penuh kesan selama masa perkuliahan. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan sukses dimasa depan.

9. Teman-teman KKN Desa Sidoreno, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan. Terimakasih selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

10. Teman teman sepermainan Nurul Azmi, Wawan Saputra, Wandistira, Hafid Kurniawan, Fauzan Nugraha, Taufik Hidayat, Jamal Alimudin, Yudha Adjie, Alfian Al Ghifari, dll yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih untuk selalu menghibur disela-sela penulisan skripsi ini.

11. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala kebaikan dan dapat mencatat sebagai amal ibadah kelak di akhirat. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk generasi yang akan datang.



Bandar Lampung, 6 Desember 2018.

Peneliti,

Tama Yudha Wiguna

NPM: 1421010054



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Metodologi Penelitian .....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Poligami .....	17
B. Alasan-Alasan Poligami .....	21
C. Sejarah Poligami .....	31
D. Syarat-Syarat Poligami.....	34
E. Hukum Poligami .....	39
<b>BAB III PENYAJIAN DAN PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung .....	45
1. Sejarah dan Perkembangan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.....	45
2. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.....	47
3. Struktur Organisasi Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.....	48
4. Program Studi Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.....	49
5. Paradigma Keilmuan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung ....	54
B. Dosen Tetap Yang Menjadi Narasumber Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung .....	55
C. Pandangan Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Tehadap Cacat Badan Sebagai Alasan Poligami.....	56

**BAB IV ANALISA DATA**

- A. Pendapat Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung tentang  
Cacat Badan sebagai Alasan Poligami ..... 81

**BAB V PENUTUPAN**

- A. Kesimpulan..... 89  
B. Saran..... 90

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “**Cacat Badan Sebagai Alasan Poligami Perspektif Dosen Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung**” untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami maksud dan tujuan serta ruang lingkup maka perlu adanya penegasan terhadap judul tersebut. Adanya penegasan terhadap arti kalimat dalam skripsi ini dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud.

1. **Cacat Badan** adalah ketidaksempurnaan pada badan dan merasa ketidaknyamanan pada seluruh tubuh atau bagian tertentu pada tubuh karena menderita sesuatu penyakit yang tidak bisa disembuhkan.<sup>2</sup>
2. **Poligami** adalah seorang laki-laki beristeri lebih dari satu, tetapi dibatasi paling banyak adalah empat orang. Karena melebihi dari empat berarti mengingkari kebaikan yang disyari’atkan oleh Allah bagi ke maslahatan hidup suami isteri.<sup>3</sup>
3. **Perspektif Dosen Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung** suatu pendapat para akademis atau tenaga pengajar yang mengajar di perguruan tinggi Islam Negeri Raden Intan Lampung yang terdiri atas sejumlah

---

<sup>2</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pn Balai Pustaka, 1989), hlm. 284.

<sup>3</sup>Slamet Abidin, H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm.131.

fakultas yang menyelenggarakan pendidikan ilmiah dan profesional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu yaitu dengan cara memperhatikan atau melihat bagaimana memaknai cacat badan sebagai alasan poligami.

Dari Penjabaran di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “Cacat Badan Sebagai Alasan Poligami Perspektif Dosen Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung” yang nanti nya untuk mengetahui pendapat dari dosen-dosen pengajar akademisi fakultas syari’ah tentang pandangan terhadap cacat badan sebagai alasan poligami.

#### **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun alasan penulis memilih judul penelitian ini berdasarkan alasan objektif dan alasan subjektif adalah sebagai berikut:

##### **1. Alasan Objektif**

Permasalahan poligami yang dibahas dalam penulisan skripsi ini cukup menarik dan relevan di tengah fakta kehidupan, karena dalam hukum agama Islam dan hukum positif negara Indonesia poligami ialah hal yang diperbolehkan. Baik ketentuan, peraturan dan syarat-syaratnya telah tertulis serta diatur oleh Allah SWT dan pemerintah Indonesia dalam Al-Quran, Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur terhadap pelaksanaan poligami, pendapat yang timbul baik secara pro dan kontra ditengah-tengah perspektif dosen fakultas syari’ah UIN Raden Intan Lampung dan fakta yang terjadi di masyarakat



terhadap pelaksanaan poligami ini sendiri cukup menarik perhatian, untuk dibahas dan diangkat dalam penulisan skripsi ini.

## 2. Alasan Subjektif

Banyak nya referensi yang mendukung sehingga dapat mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi tersebut serta pokok bahasan skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penyusun pelajari di fakultas syari'ah jurusan *Ahwal Al-syakhshiyah* UIN Raden Intan Lampung.

### C. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum Islam pelaksanaan poligami itu sendiri diperbolehkan tetapi tetap ada batasan, syarat dan ketentuannya paling banyak adalah empat orang. Karena melebihi dari empat berarti mengingkari kebaikan yang di syari'ahkan oleh Allah SWT bagi kemaslahatan dalam kehidupan pasangan suami isteri tersebut.<sup>4</sup> Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa': 3.

Alasan pembatasan 4 orang isteri menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab beliau yaitu Fiqih Islam Wa Adillatuhu bahwa poligami agar semua celah yang dapat menimbulkan kepada berbagai penyimpangan dapat ditutup. Serta perilaku yang mungkin saja dilakukan oleh beberapa laki-laki dengan memiliki wanita idaman lain tanpa sepengetahuan isteri, dan juga memiliki wanita penghibur, selanjutnya menurut pandangan Wahbah Az-Zuhaili dalam bertambahnya jumlah isteri dari satu menjadi empat, dikawatirkan memicu perbuatan maksiat dari

---

<sup>4</sup>*Ibid.* hlm. 131.

para isteri akibat suaminya tidak mampu dalam memenuhi hak-hak para isteri, karena secara zahir seorang laki-laki tidak mampu memenuhi hak-hak mereka.<sup>5</sup>

Dengan ayat ini pula dapat diambil dalil, bahwa haram menikahi perempuan lebih dari empat orang. Jika ada orang yang berpendapat bahwa ayat menunjukkan bolehnya seorang laki-laki menikahi sembilan orang perempuan yaitu jumlah kelipatan dari dua, tiga, empat, tidaklah dapat diterima pendapat yang seperti itu, karena dalam ayat ini ada kata “atau”, jadi makna yang terkandung dalam ayat ini yaitu boleh memilih dua, tiga, atau empat.<sup>6</sup>

Adapun secara hukum Islam adanya poligami adalah jalan untuk kemaslahatan dalam rumah tangga tersebut sebagai salah satu cara penyelesaian dari permasalahan-permasalahan yang timbul dalam suatu hubungan perkawinan (monogami), walaupun perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga bahagia sejahtera baik lahir maupun batin, namun pada kenyataannya tujuan perkawinan tidak dapat terwujud secara utuh, hal itu disebabkan karena salah satu pihak di antara suami isteri tidak mampun melaksanakan kewajiban sebagai mana yang telah ditentukan sehingga menimbulkan perselisihan atau masalah di dalam kehidupan berumah-tangga. Akan tetapi terlaksananya poligami tetap harus memenuhi syarat-syarat serta ketentuan yang telah ditetapkan.

Sayyid Sabiq memberikan pandangan bahwa ketika seorang laki-laki ingin berpoligami maka langkah itu harus melewati tes uji penelitian yang dilakukan

---

<sup>5</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985), hlm. 167.

<sup>6</sup> Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 193.

oleh kehakiman dan instansi terkait yang memiliki wewenang, hal ini berkaitan dengan kemampuan secara materi untuk menafkahi para isteri dan anak. Instansi ini lah yang nantinya berhak memberikan izin kepadanya untuk menikah lagi atau berpoligami.<sup>7</sup>

Sebagaimana tertera di dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pada dasarnya asas perkawinan menganut asas monogami, tetapi bila dikehendaki yang bersangkutan dengan hukum dan agama membenarkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang (Poligami). Namun hal itu hanya dilakukan apabila terpenuhi berbagai persyaratan tertentu dan memperoleh izin dari pengadilan.<sup>8</sup>

Pasal 3 Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan peluang kepada seorang suami untuk melakukan poligami. Artinya, terdapat alasan-alasan yang membolehkan dan membenarkan dilakukannya poligami oleh suami. Alasan-alasan yang dimaksudkan sebagaimana terdapat dalam Undang Undang Perkawinan tersebut, juga secara terperinci terdapat dalam Bab I Dasar Perkawinan Pasal 4.<sup>9</sup> Yang menyebutkan sebagai berikut:

1. Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2 Undang Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

---

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Al Fiqih Al Sunnah* (Bairun: Daruk Fikri, 1983), hlm. 108.

<sup>8</sup> H. Arso Sastroatmojo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1988), hlm.72.

<sup>9</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 289.



2. Pengadilan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Dan hal yang sama dijelaskan akan pelaksanaan Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Beristeri lebih dari seorang yaitu dalam pasal 41 point a dan Kompilasi Hukum Islam pasal 57 yang pada intinya disebutkan :

1. Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
2. Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Bahwa isteri tidak dapat melahirkan.

Sedangkan dalam hal isteri yang cacat badan atau terkena penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri dapat dipahami bahwa penyakit yang dideritanya telah menyerang unsur-unsur vital dan lahiriyahnya, bahkan mentalitasnya, misalnya kelumpuhan total dan gila.

Adapun cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan bisa saja menyerang unsur vital lahiriyahnya, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk terus diupayakan penyembuhannya meskipun menghabiskan waktu yang cukup lama. Penyakit atau cacat badan yang dialami isteri dapat dikatakan sebagai

sebab tidak terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin suami, misalnya hubungan seksualitasnya sehingga suami membutuhkan isteri lain. Oleh karena itu suami dapat dibenarkan oleh Undang-Undang dan hukum agama Islam jika mengajukan permohonan ke Pengadilan agama untuk melakukan poligami.

Serta apabila membahas poligami tak luput dari pandangan bagaimana reaksi di tengah-tengah masyarakat baik secara pro ataupun kontra, yang artinya masyarakat menilai poligami itu secara berbeda-beda. Ada yang menanggapi bahwa poligami adalah fakta agama yang mana seorang laki-laki yang memiliki isteri lebih dari satu merupakan bagian dari perintah agama dan faktanya, Nabi Muhammad SAW sebagai panutan ummat muslim pada kenyataannya juga berpoligami. Namun bagi sebagian lainnya beranggapan bahwa, poligami justru lebih cenderung sekedar memenuhi keinginan duniawi yang merupakan bentuk hasrat nafsu manusia untuk menyalurkan hasrat seksual nya semata-mata melainkan dengan cara yang sah dan bermartabat.<sup>10</sup>

Sejauh ini, banyaknya orang Islam beranggapan bahwa poligami justru menjadi syari'ah agama Islam karena terdapat anjuran yang disebutkan dalam kitab suci al-Quran. Padahal, yang disebutkan dalam ayat 3 surat An-nisa, bukanlah sebuah perintah agama apalagi syari'ah karena berdasarkan pengamatan simantik Arab, kalimat perintah terkadang bermakana sebuah

---

<sup>10</sup> Musbah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender dan Perserikatan Solidaritas Perempuan, 1999), hlm. 60.

larangan, peringatan atau bahkan ancaman. Inilah kemudian yang membawa pendapat seorang pakar tafsir al-Quran, Syekh Muhammad Toha Ad-Durroh, juga sama dalam hal poligami yang bukanlah termasuk ke dalam syari'ah Islam, tetapi merupakan kondisi darurat kemanusiaan atas dorongan pemenuhan hedonistik dan sikap gaya hidup seseorang zaman kekikinian.

Munculnya beragam pendapat atas persoalan hukum praktik terhadap poligami, membawa kepada sebuah pendapat bahwa praktik ini justru dipicu oleh kondisi darurat kemanusiaan, di mana ketika kekhawatiran akan ketidakadilan dari imbas akan poligami, atau muncul niatan tersembunyi hanya sekedar menguasai harta orang lain yang akan dipoligami, maka kebijakan dengan mencari wanita yang diminati merupakan solusi terakhir dalam kondisi darurat.

Hal inilah yang memotivasi saya selaku penulis untuk menghimpun serta mengumpulkan berbagai pendapat dan tanggapan dari para dosen-dosen fakultas syari'ah selaku dewan pengajar akademisi di fakultas syari'ah untuk kesediaannya menanggapi mengenai poligami. Yang nantinya saya angkat dalam pokok bahasan permasalahan dalam skripsi saya yang berjudul, "Cacat Badan Sebagai Alasan Poligami Perspektif Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung".



#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain yaitu:

Bagaimanakah pendapat dosen fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung tentang cacat badan sebagai alasan poligami?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah di mana berbagai data dan informasi dikumpulkan, dirangkai dan dianalisa yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, dan juga dalam rangka pemecahan masalah-masalah yang dihadapi.<sup>11</sup> Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui bagaimana pendapat dosen fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung tentang cacat badan sebagai alasan poligami.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk mencoba mengaplikasikan ilmu yang telah diajarkan di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, Manfaat penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, sebagai sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan karya ilmiah yang menjelaskan tentang cacat badan sebagai

---

<sup>11</sup>Soerjonosoekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan ketiga ( Jakarta: UI-Press, 1986), Hlm. 2.

alasan poligami menurut pandangan dosen fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi masyarakat luas sebagai bahan untuk pembinaan masyarakat tentang ketentuan poligami dalam hukum Islam dan manfaat praktis memberikan kontribusi terhadap pengembangan literature penelitian mengenai permasalahan cacat badan sebagai alasan poligami.

## G. Metodologi Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dalam hal ini, peneliti ingin membahas pandangan pribadi seorang. Pandangan masing-masing orang berbeda-beda. Kadang perbedaan pandangan ini sangat jelas. Bagaimanapun juga, terkadang pandangan orang juga hampir mirip. Untuk mengetahui selisih perbedaan pandangan yang sedikit ini, alasan informan dan penjelasan secara rinci perlu digali. Peneliti ingin memahami dan menggambarkan pandangan informan yang rumit itu secara mendalam, bukan secara garis besar saja. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif dianggap paling cocok untuk penelitian ini.

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang datanya diperoleh melalui wawancara dengan beberapa informan yang sudah dipilih dan ditentukan. Pandangan dosen fakultas

syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang menjadi data pokok yang telah dipilih dengan berbentuk hasil wawancara. Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu proses penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yaitu kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diwawancarai dan perilaku yang diamati.<sup>12</sup> Di mana data-data deskriptif tersebut merupakan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka.<sup>13</sup> Jadi penulis berusaha semaksimal mungkin menjabarkan mengenai kontekstualisasi konsep cacat badan sebagai alasan poligami perspektif dosen fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang mana dari pandangan dosen memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya.

- b. Kemudian sifat penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas, peristiwa pada masa sekarang.<sup>14</sup> Yang dimaksud dengan subjek penelitian adalah dosen fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

## 2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

---

<sup>12</sup>Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), hlm.3.

<sup>13</sup>*Ibid.* hlm. 6.

<sup>14</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 63.



a. Sumber Data Primer

Sumber data Primer dalam penelitian yaitu data diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa dosen fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang mana diperoleh langsung dari wawancara dilengkapi dengan dokumen yang memuat pandangan dosen khususnya tentang Hukum Keluarga.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang mendukung sumber data primer berupa buku-buku dan literature tentang, pernikahan, cacat badan dan poligami.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dari sumber data, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Metode wawancara

Wawancara adalah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula. Ciri-ciri utama dari wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dengan sumber informasi.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa dosen yang ada di fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

---

<sup>15</sup>Margono, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 54.

#### b. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber buku, jurnal, artikel yang dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian ini. Studi ini dimaksudkan untuk mengumpulkan atau memahami data-data sekunder dengan berpijak pada berbagai literature dan dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data yang mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, logger, agenda, dan sebagainya.<sup>16</sup> Metode ini digunakan untuk menghimpun atau memperoleh data. Pelaksanaan metode ini dengan mengadakan pencatatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang berhubungan dengan gambaran umum lokasi penelitian yaitu fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

#### 4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan

---

<sup>16</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 188.

oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>17</sup> Yang menjadi populasi dari penelitian ini yaitu pada dosen fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang kurang lebih berjumlah 91 orang dengan perincian Dosen Tetap PNS sebanyak 47 orang, Dosen Kontrak sebanyak 15 orang dan Dosen Luar Biasa sebanyak 29 orang.<sup>18</sup> Dan 7 orang dosen yang dipilih lebih cenderung menguasai perihal ilmu fiqh khususnya hukum keluarga itulah nantinya yang akan dipilih untuk diwawancarai. Dari populasi tersebut penulis menentukan sample dengan menggunakan teori *purposive sampling* (sampel bertujuan) yaitu sebesar 7 orang dengan asumsi bahwa sample tersebut dapat menguasai hukum keluarga secara umum dan secara khusus kedalam fiqh munakahat.

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti. Dalam penelitian ini tidak semua populasi akan dijadikan sumber data melainkan diambil sampelnya saja, antara lain beberapa dosen tetap fakultas syari'ah yang memiliki kompetensi dalam bidang ilmu Hukum Keluarga. Dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel dilakukan dengan cara mengambil subyek bukan didasarkan atas seterata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Sugiono, Metode Penelitian Administrasi (Bandung: Alfabeta, 2001), hlm. 57.

<sup>18</sup> Fathul Mu'in, ed. Profil Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Raden Intan Lampung 2016 (Lampung: Fakultas syari'ah dan Hukum IAIN Raden Intan Lampung 2016), hlm. 30.

<sup>19</sup> Sugiono, Statistika Untuk Penelitian (Bandung: Alfabeta CV, 2011), hlm. 64.



## 5 Teknik Pengolahan Data

Setelah keseluruhan data terkumpul maka tahap selanjutnya dengan cara:

- a. Pemeriksaan Data (*editing*) adalah mengkoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah.
- b. Penandaan Data (*cading*) yaitu pemeriksaan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literature, peraturan dalam ilmu hukum atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun, penerbit) atau urutan rumusan masalah.

## 6 Metode Analisa Data

Untuk menganalisa data dilakukan secara kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti.<sup>20</sup>

Setelah analisa data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu suatu penjelasan dan penginterpretasikan secara logis, sistematis. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir deduktif.

---

<sup>20</sup>Lexy J, Moeloeng, *Op.Cit.* hlm. 13.

Cara berfikir deduktif adalah metode analisa data dengan cara bermula dari data yang bersifat umum tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>21</sup>



---

<sup>21</sup>Sutrisno Hadi, *Methodologi Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984), hlm. 42.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Poligami

Pengertian poligami secara etimologi poligami terdiri dari dua kata yaitu Poli yaitu banyak dan Gami artinya isteri. Jadi poligami itu beristeri banyak. Sedangkan secara terminologi, poligami adalah seorang laki-laki yang mempunyai isteri lebih dari satu yang dibatasi paling banyak empat orang isteri.<sup>22</sup> Poligami juga diartikan yaitu seorang laki-laki yang beristeri lebih dari satu seorang.

Secara bahasa kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang artinya banyak dan *gamein* atau *gamos* yang artinya kawin. Jadi poligami adalah kawin banyak, maksudnya yaitu seorang pria mempunyai beberapa orang isteri pada saat yang bersamaan. Dalam bahasa Arab poligami disebut *تعدد الزوجات* yaitu berbilangnya pasangan.<sup>23</sup>

Menurut Musdah Mulia, poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa atau lebih dari satu isteri dalam waktu yang bersamaan. Selain poligami, dikenal juga poliandri yaitu seorang isteri mempunyai beberapa suami dalam waktu yang bersamaan. Dibandingkan dengan poligami, bentuk poliandri tidak banyak

---

<sup>22</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003), hlm. 129.

<sup>23</sup>H. Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 113.

dipraktekkan. Poliandri hanya ditemukan pada suku-suku tertentu, seperti pada suku Tuda dan beberapa suku di Tibet.<sup>24</sup>

Dalam perbendaharaan bahasa Indonesia, kata poligami bermakna sama dengan poligini dan permaduan yaitu perkawinan antara satu orang suami dengan dua orang isteri atau lebih.<sup>25</sup> Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 55 ayat 1, menyatakan bahwa poligami beristeri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan dan terbatas hanya sampai empat orang isteri.<sup>26</sup>

Allah SWT berfirman. seorang laki-laki menikahi perempuan sampai empat orang isteri dengan syarat berlaku adil kepada mereka, yaitu adil dalam melayani isteri seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriyah. Jika tidak berlaku adil maka cukup satu isteri saja (monogami). Melebihi dari empat orang isteri juga mengingkari kebaikan yang disyariatkan oleh Allah bagi kemaslahatan hidup suami isteri. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa: 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. ٣

Artinya : "Dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.

<sup>24</sup>Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), hlm. 32.

<sup>25</sup>Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 329.

<sup>26</sup>Tim Arkola, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Surabaya: Arkola, 2005), hlm. 196.



*Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tindak berbuat aniaya”.*<sup>27</sup>

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman:

An-nisa: 129 :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوا  
كَالْمَعْلُوقَةِ وَإِنْ تَصْلَحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ١٢٩

Artinya: *”Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*

(QS An-Nisa’: 129)<sup>28</sup>

Maksud ayat tersebut adalah jika seorang laki-laki merasa yakin tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak perempuan yatim, maka carilah perempuan lain. Pengertian semacam ini dalam ayat tersebut bukanlah sebagai hasil dari pemahaman secara tersirat, sebab para ulama sepakat bahwa siapa yang yakin dapat berbuat adil terhadap anak perempuan yatim, maka ia berhak menikahi perempuan lebih dari seorang.

Sebaliknya, jika takut tidak dapat berbuat adil ia dibolehkan menikah dengan perempuan lain. Berlaku adil yang dimaksudkan adalah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri, seperti: pakaian, tempat, giliran, dan lain-lain yang bersifat lahiriah.

Serta dalam hadits berkaitan dengan praktik pernikahan disebutkan dalam Islam, berupa anjuran jumlah wanita yang dibatasi empat orang dalam pernikahan yang dijalani oleh seorang hamba.

<sup>27</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya* (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1996), hlm. 61.

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm. 144.

Hal ini sejalan dengan bunyi hadits:

عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ غِيلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّقْفِيَّ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ أَوْ خَبَرْنَا مَالِكٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، حَدِيثَ غِيلَانَ.

Artinya: “Dari salim, dari ayahnya Radiallaahu anhu bahwa Ghalian Ibnu Salamah masuk Islam dan ia memiliki sepuluh orang isteri dan ia yang juga masuk Islam bersamanya. Lalu Nabi Shallallahualaihi wa Sallam menyuruhnya untuk memilih empat orang isteri diantara mereka dan ceraikan selebihnya. Hadits ini didapat dari Imam Malik dan Zuhri, Hadits Ghallan.<sup>29</sup>

Dan juga hadits tentang Qais Ibnu Al-Harits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah:

عَنْ قَيْشِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ. فَاتَّيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقُلْتُ ذَلِكَ، فَقَالَ: اخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهٍ.

Artinya: “Qais Ibnu Al-Harits ia berkata: Ketika masuk Islam saya memiliki delapan isteri, saya menemui Rasulullah dan menceritakan keadaan saya, lalu beliau bersabda: “Pilih empat diantara mereka”. (H.R. Ibnu Majah)

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjadikan ayat ini sebagai penguat riwayat-riwayat sebelumnya. Jadi, riwayat Sahabat yang beristeri lebih dari empat lalu nabi memerintahkan untuk memilih empat saja dan menceraikan sisanya adalah riwayat-riwayat yang bisa dijadikan alasan dalam pembahasan hukum Syara’ sehingga memberi batasan isteri maksimal empat.<sup>30</sup>

<sup>29</sup>Imam Asy Syaf’i, Musnad Imam Syafi’i Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009) Hlm. 519.

<sup>30</sup>Shadiq Ramadhan, Benarkah Poligami Terbatas Empat Saja, tersedia di: <http://www.suara-islam.com/read4956-Benarkah-Poligami-Terbatas-Empat-Saja-.html> (12 Juli 2012)

Setelah munculnya batasan jumlah wanita yang boleh dinikahi oleh seorang pria, ada hal yang menjadi dasar kebolehan menikah dalam jumlah yang dibatasi tadi. Sehingga muncullah syarat adil dalam melakukan poligami sebagaimana bunyi di akhir ayat di atas yang mana disertai dengan ancaman jika tidak berlaku adil mana ia telah berbuat aniaya.

Islam memang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Dan ayat tersebut membatasi diperbolehkannya poligami hanya empat orang saja. Namun apabila takut akan berbuat durhaka apabila menikah dengan lebih dari seorang perempuan, maka wajiblah ia cukupkan dengan seorang saja.

Dari beberapa pengertian poligami di atas yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah jika seorang laki-laki beristeri lebih dari satu perempuan dengan syarat harus bisa berbuat adil dalam memberi nafkah lahir dan batin.

## **B. Alasan-Alasan Pologami**

Kebutuhan suami untuk beristeri lebih dari seorang dan jika tidak berpoligami maka bisa menimbulkan kemudharatan pada dirinya dan keluarganya, misalnya takut terjerumus dalam perzinahan. Sebagaimana pada Undang-Undang Dasar 1945 poligami diatur dalam hukum Islam, Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan pelaksanaannya tertulis Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah Nomer 10 Tahun 1983.

Pada dasarnya kita ketahui bahwa Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menganut prinsip monogami sehingga poligami dalam praktek untuk dipersulit.

Prinsip ini tertera pada pasal 3 ayat 1 dan 2 Undang-Undang yang antara lain mengatakan:

1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dari kedua pasal tersebut jelas bahwa monogami adalah prinsip dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974, tetapi prinsip tersebut bukan bersifat mutlak adanya.

Poligami diperkenankan asal yang bersangkutan sebelumnya harus meminta izin terlebih dahulu kepada pengadilan, jadi di sini seseorang dapat atau tidaknya untuk melakukan poligami tergantung keputusan dari pihak pengadilan.

Adapun sebab-sebab alasan seseorang untuk dapat melakukan poligami di antaranya sebagai berikut :

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.



Alasan-alasan tersebut oleh Ridwan Syahrani dan Abdurrahman dikatakan bahwa oleh pembentukan dalam Undang-Undang alasan tersebut dirumuskan sangat umum sekali bahkan relatif dan sensitif sekali, sebagaimana misal terhadap alasan nomer 1 (Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri) maka akan timbul persoalan yang akan menjadi pertanyaan, Bagaimana seorang isteri dapat dikatakan tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri?

Jika seorang isteri dalam keadaan normal bahkan menurut pemeriksaan dokter kelainan atau gangguan pada jiwa raganya akan tetapi ditempat tidur ia tak menimbulkan gairah cinta lagi bagi suaminya lantaran sang suami sudah terlalu jenuh, apakah hal demikian dapat dikatakan seorang isteri tidak dapat menjalankan hal kewajiban sebagai isteri.

Demikian juga pada alasan nomer 2 dalam Undang-Undang tersebut (Isteri mendapat cacat badan atau penyakit tidak dapat disembuhkan), maka persoalan yang akan timbul menjadi pertanyaan ialah. Cacat badan atau penyakit seperti apakah yang termasuk ke dalam kriteria sehingga seorang suami dapat diperkenankan untuk mengajukan permohonan poligami.

Oleh karena itu rumusan alasan berpoligami nomer 1, 2, dan 3 tersebut harus dilihat secara kasuistis.<sup>31</sup>

Saya bersependapat dengan pendapat Abdurrahman dan Ridwan Syahrani yang mana tugas hakimlah yang harus meneliti dengan seksama

---

<sup>31</sup>Ridwan Syahrani, Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia (Bandung: Alumni, 1978), hlm. 87-88.

untuk kemudian memberikan penetapannya dengan sebaik-baiknya dan setepat-tepatnya.

Lain hal dalam peraturan lain poligami menurut Peraturan Pemerintah Nomer 10 Tahun 1983, menurut Peraturan Pemerintah ini bila seorang pegawai negeri sipil akan melakukan poligami maka ia harus meminta izin terlebih dahulu kepada pejabat yang merupakan atasan dari pegawai negeri sipil tersebut. Hal ini secara tegas tercantum pada pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomer 10 Tahun 1983 yang berbunyi:

1. Pegawai negeri sipil pria yang beristeri lebih dari seorang wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.
2. Pegawai negeri sipil tidak diizinkan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari pegawai negeri sipil.
3. Pegawai negeri sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari bukan pegawai negeri sipil, wajib terlebih dahulu mendapat izin dari pejabat.
4. Permintaan izin sebagaimana dimaksud didalam ayat (1) dan ayat (3) diajukan secara tertulis.
5. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus dicantumkan alasan yang lengkap yang didasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat.

Adapun yang dimaksud dengan pejabat tersebut adalah Menteri (untuk departement yang bersangkutan), Jaksa Agung (untuk jaksa-jaksa

yang berada di bawahnya), Pimpinan Lembaga Pemerintah non Departement: Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi/Lembaga Tertinggi Negara, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Pemimpin Bank-Bank Milik Negara dan daerah serta pimpinan badan-badan usaha milik negara dan daerah.<sup>32</sup>

Keberadaan izin dari pejabat tersebut adalah wajar mengingat keberadaan pegawai negeri sebagai abdi negara maupun sebagai kelompok masyarakat. Dengan demikian merupakan suatu hal yang wajar apabila kelompok atau golongan ini akan menjadi panutan bagi masyarakat yang lain.

Di samping itu yang sekaligus menjadi titik berat yang menjadi tujuan dari Peraturan Pemerintah Nomer 10 Tahun 1983 adalah untuk meningkatkan disiplin pegawai negeri sipil dalam hal perkawinan, poligami, dan perceraian. Oleh karena itu kepada semua pegawai negeri sipil yang beragama Islam tanpa terkecuali, akan dikenai pasal-pasal yang ada pada Peraturan Pemerintah tersebut.

Dan di dalam Kompilasi Hukum Islam dibahas tentang perkawinan pada BAB IX dengan judul Beristeri Lebih Dari Satu Orang atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Poligami. Yang mana pembahasan terkait poligami terdapat pada pasal 55, 56, 57, 58, 59.<sup>33</sup>

Dalam pasal 55 menyebutkan bahwa bagi suami yang akan beristeri lebih dari satu terbatas hanya sampai empat orang dan syarat

---

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm 82-83.

<sup>33</sup>Ahmad Kuzairi, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 1995) hlm. 120.

utamanya adalah suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Apabila syarat utama ini tidak dapat dipenuhi, maka suami dilarang beristeri lebih dari seorang.<sup>34</sup>

Selanjutnya dalam pasal 56 menerangkan, apabila seorang suami yang akan beristeri lebih dari satu orang, maka ia wajib mengajukan secara tertulis ke pengadilan agama dan harus mengikuti prosedur yang diatur dalam BAB VIII Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975. Apabila perkawinan yang dilakukan tanpa izin pengadilan agama maka tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>35</sup>

Dapat dilihat dari pasal 55 dan 56 diatas, Kompilasi Hukum Islam sepertinya tidak berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan serta termasuk di dalamnya semangat unsur ilmu fiqih.

Namun pada dasarnya peluang yang diberikan untuk poligami juga terbuka lebar. Demikian, kontribusi Kompilasi Hukum Islam hanya sebatas prosedurnya permohonan poligami.<sup>36</sup>

Di dalam pasal 57 menjelaskan tentang alasan-alasan pengadilan agama mengizinkan seorang suami melakukan poligami. Terdapat pada pasal 57 KHI, pengadilan agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari satu apabila terdapat alasan-alasan sebagai berikut:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.

---

<sup>34</sup>Instruksi Presiden RI Nomer 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2001), hlm. 34.

<sup>35</sup>*Ibid.*

<sup>36</sup>Aminur Nuruddin, Azhari Akmal Taringan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 167.

2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dapat dilihat dari pasal 57 ini syarat untuk mendapatkan izin dari pengadilan agama harus memenuhi persyaratan diatas dimana syarat tersebut sama persis dengan yang terdapat pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>37</sup>

Dalam pasal 58 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat 2 maka untuk memperoleh izin dari pengadilan agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yaitu:
  - a. Adanya persetujuan isteri.
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah adanya persetujuan tertulis, persetujuan itu dipertegas oleh isteri pada sidang pengadilan agama.
3. Persetujuan dimaksud pada ayat 1 huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila seorang isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin

---

<sup>37</sup>Instruksi Presiden RI Nomer 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam. *Op. Cit.* hlm. 34.



dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian karena isteri tersebut hilang atau tidak ada kabar sekurang-kurangnya dua tahun, atau sebab lain yang memerlukan pendapat dari hakim.<sup>38</sup>

Apabila seorang isteri tidak memberikan persetujuan atau permohonan izin untuk suami beristeri lagi berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat 2 dan pasal 57, pengadilan agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengarkan isteri yang bersangkutan dipersidangan pengadilan agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.<sup>39</sup>

Terlihat pada pasal 59 di atas mengisyaratkan betapa besarnya wewenang pengadilan agama dalam memberikan suatu izin, sehingga isteri yang tidak mau memberikan izin kepada suami yang ingin berpoligami dapat diambil alih oleh pengadilan agama. Namun dapat dilihat dari pasal-pasal di atas yang hampir semua isinya mengadopsi dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

Dalam tafsir Al-Maragi, jilid IV, halaman 181-182 disebutkan, bahwa alasan untuk dapat melakukan poligami adalah :

- a. Tidak mempunyai anak yang akan menyambung keturunan.
- b. Isteri pertama menderita penyakit menahun (*chronis*) yang tidak memungkinkan melakukan tugas-tugasnya sebagai isteri.

---

<sup>38</sup>*Ibid.* hlm. 35.

<sup>39</sup>*Ibid.*

- c. Sebab tabiat kemanusiaan suami, yaitu nafsu keinginan yang terlalu besar (kuat), sehingga suami memerlukan isteri lebih dari seorang.
- d. Jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki, karena peperangan dan lain-lain, termasuk di dalamnya ialah permasalahan sosial yang perlu mendapatkan perhatian.<sup>40</sup>

Wahbi Sulaiman juga menyebutkan dalam bukunya *Sosok-Sosok Perempuan Muslim* tentang alasan-alasan seseorang yang ingin melakukan poligami yaitu:

1. Kadang-kadang adanya keinginan untuk mencontoh Rasulullah SAW yang memiliki isteri banyak sebagaimana hal lainnya yang selalu beliau lakukan.
2. Tingginya kekuatan fisik dan nafsu seksual seorang laki-laki, sehingga tidak puas hanya memiliki satu isteri.
3. Adanya keinginan untuk memperbanyak keturunan.
4. Isteri pertama tidak bisa memberi keturunan, atau hanya memberi sedikit keturunan sedangkan suami ingin mempunyai keturunan lebih banyak lagi.
5. Adanya kekhawatiran suami karena saudara laki-laknya meninggal dan meninggalkan banyak anak, sehingga isteri dan anak-anak saudaranya itu terlantar.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup>Titik Triwulan Tutik, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), hlm. 72.

<sup>41</sup>Wahbi Sulaiman Gawajji Al-Albani, *Sosok-Sosok Perempuan Muslim* (Bandung: Trigenda Karya, 1995), hlm. 127.

Maka terlepas dari ini semua pada zaman sekarang kursus pra-nikah ada dilatarbelakangi oleh banyaknya pernikahan yang hancur karena kurangnya persiapan, atau terkesan terburu-buru. Kenapa demikian? Karena banyak sekali pasangan suami istri yang tidak memikirkan dan merencanakan hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan setelah itu. Selain itu, dalam membina sebuah rumah tangga, terkadang muncul persoalan-persoalan yang dapat menimbulkan konflik. Apabila konflik tersebut tidak dapat diselesaikan dengan *ma'rûf*, maka tidak sedikit pasangan yang berujung pada putusnya sebuah ikatan perkawinan.<sup>42</sup>

Berkenaan dengan keadaan darurat yang membolehkan seseorang untuk poligami, menurut Abdurrahman setelah merangkum pendapat *fuqaha'*, setidaknya terdapat delapan perkara yang dianggap darurat, yaitu:

1. Isteri mengidap suatu penyakit yang berbahaya dan sulit disembuhkan.
2. Isteri terbukti mandul dan dipastikan secara medis tidak dapat melahirkan.
3. Isteri hilang ingatan.
4. Isteri sudah lanjut usia sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai isteri.
5. Isteri memiliki sifat dan tabiat buruk.
6. Isteri meninggalkan rumah tanpa sebab dan tidak diketahui keberadaanya.

---

<sup>42</sup>Muhammad Lutfi Hakim, Kursus Pra-Nikah: Konsep dan Implementasinya, Jurnal Al-Adalah (Fakultas Syari'ah, Vol. 13, No. 2 Desember 2016), hlm. 144.

7. Ketika jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki.<sup>43</sup>

Alasan-alasan poligami tertulis dan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 secara pelaksanaannya dipertegas dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, namun tetap pada dasarnya perkawinan di Indonesia menganut prinsip asas monogami tetapi prinsip ini bukanlah bersifat mutlak dikarenakan pengadilan agama memperkenankan dan memperbolehkan poligami asalkan syarat, alasan, dan ketentuannya telah terpenuhi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dan perumusan alasan-alasan poligami yang dibentuk dan dibuat dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam masih termasuk ke dalam hal yang sangat umum bahkan relatif dan sensitif sekali, oleh karena itu rumusan alasan-alasan poligami ini masih harus perlu dilihat secara kasuistik yang artinya hakim harus lebih meneliti lebih seksama dalam suatu keadaan, sehingga pada akhirnya dapat memberikan penetapan dengan sebaik-baiknya dan setepat-tepatnya.

### C. Sejarah Poligami

Keberadaan poligami atau menikah lebih seorang isteri dalam lintasan sejarah bukan merupakan hal baru. Poligami telah ada dalam kehidupan manusia sejak dahulu kala di antara berbagai kelompok masyarakat di berbagai kawasan dunia. Orang-orang Arab telah berpoligami jauh sebelum kedatangan Islam, demikian pula masyarakat

---

<sup>43</sup>Amiur Nurudin, Azhari Akmal Tarigan. *Op. Cit.*, hlm. 37.

lain di sebagian besar kawasan dunia selama masa itu, termasuk di Indonesia. Para raja dan pembesar kerajaan nusantara umumnya memiliki isteri lebih dari seorang yang biasa disebut *Garwa Padmi* (permaisuri atau isteri syah) dan *selir* atau *gundik* (isteri simpanan atau kekasih).<sup>44</sup>

Orang-orang Eropa yang sekarang kita sebut Rusia, Yugoslavia, Cekoslovakia, Jerman, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia dan Inggris semuanya adalah bangsa-bangsa yang berpoligami. Demikian juga bangsa-bangsa timur seperti bangsa Ibrani dan Arab, mereka juga berpoligami. Karena itu tidak benar apabila ada tuduhan bahwa Islamlah yang melahirkan aturan tentang poligami, sebab nyatanya aturan poligami yang berlaku sekarang ini juga hidup dan berkembang di negeri-negeri yang tidak menganut Islam, seperti Afrika, India, Cina dan Jepang. Tidaklah benar kalau berpoligami hanya terdapat di negeri-negeri Islam.<sup>45</sup>

Sekali lagi sejarah poligami sudah ada sejak dahulu kala, pada kehidupan manusia di berbagai kelompok masyarakat seluruh penjuru dunia. Kitab-kitab suci agama-agama Samawi dan buku-buku sejarah menyebutkan bahwa dikalangan para pemimpin maupun orang-orang awam disetiap bangsa, bahkan di antara para Nabi sekalipun, poligami bukan merupakan hal yang asing ataupun tidak disukai.<sup>46</sup> Dalam kitab suci agama Yahudi dan Nasrani, poligami telah merupakan jalan hidup yang diterima. Semua Nabi yang disebut Talmud, perjanjian lama, dan Al-

---

<sup>44</sup>Titik Triwulan Tutik. *Op. Cit.*, hlm. 6.

<sup>45</sup>Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 39.

<sup>46</sup>Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an, as-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan Media Utama), hlm. 90.



Qur'an, beristeri lebih dari seorang, kecuali Yesus atau Nabi Isa as. Bahkan di Arab sebelum Islam telah dipraktekkan poligami tanpa batas.<sup>47</sup>

Bentuk poligami ini telah dikenal di antara-antara orang Medes, Babilonia, Abbesinia, Persia. Nabi SAW. Memperbolehkan poligami diantara masyarakat karena sudah dipraktekan pula oleh orang-orang Yunani yang di antaranya seorang isteri bukan hanya dapat dipertukarkan tetapi juga dapat diperjualbelikan secara lazim di antara mereka. Poligami merupakan kebiasaan di antara suku-suku Bangsa di Afrika, Australia serta Mormon di Amerika. Bahkan ajaran Hindu di India tidak melarang poligami.<sup>48</sup>

Ketika Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW, sebagai Nabi terakhir di Negara Arab, telah melarang perzinaan dan bentuk-bentuk lain yang menganggap perempuan sebagai barang dan hewan yang dapat dimiliki. Islam tidak mengharamkan poligami secara mutlak, tetapi diberi batasan dan syarat. Dengan adanya batasan jumlah perempuan yang akan dijadikan isteri agar terjadi kemaslahatan dalam keturunan, pranata sosial dan kesiapan bagi kaum lelaki. Seorang lelaki hanya dapat diperbolehkan menikahi maksimal empat orang perempuan. Tentu saja harus dengan persyaratan mampu memberi nafkah dan bisa berlaku adil.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup>Abdurrahman I Doi, Inilah Syari'ah Islam Terjemahan, *Buku The Islamic Law*, Usman Efendi AS, Abdul Khaliq (Jakarta: Pustaka Panji, 1990), hlm. 207.

<sup>48</sup>Abdurrahman I Doi, Perkawinan dalam Syari'at Islam, *Syari'at The Islamic Law*, Terjemahan Basri Aba Asghary, Wadi Masturi (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 43.

<sup>49</sup>Muhammad Rasid Ridha, Jawaban Islam Terhadap Berbagai Keraguan Seputar Keberadaan Wanita (Surabaya: Pustaka Progresif, 1992), hlm. 78.

#### D. Syarat-Syarat Poligami

##### 1. Syarat-Syarat Poligami Menurut Perundang-Undangan

Menurut Perundang-Undangan yang ada di Indonesia, seorang suami boleh melakukan poligami asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974. Syarat syarat tersebut telah dijelaskan dalam pasal 4, 5 ayat 1 beserta penjelasannya:<sup>50</sup>

Pasal 4 ayat 1 Tahun 1974 Undang-Undang perkawinan sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan Isteri atau Isteri-Isteri.
- b. Adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan-keperluan Isteri-isteri dan anak-anak mereka
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Pasal 5 ayat menjelaskan sebagai berikut:

- a. Harus ada izin dari pengadilan.
- b. Bila dikehendaki oleh yang bersangkutan.
- c. Hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkan.

Dan apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang selain harus terlebih dahulu mendapatkan surat penetapan dari pengadilan agama, maka yang bersangkutan juga harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pasal 4, 5 Undang-Undang

---

<sup>50</sup>Tim Arkola. *Op. Cit.*, hlm. 7.

No 1 Tahun 1974 dan pasal 40 dan 41 PP No 9 Tahun 1975, yang menyebutkan:

Pasal 40: Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari satu maka ia wajib untuk mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan.

Pasal 41: Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
  - 1) Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
  - 2) Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
  - 3) Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunannya.
- b. Ada atau tidaknya persetujuan lisan maupun tertulis apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, maka persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
- c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan isteri dan anak-anaknya dengan memperlihatkan:
  - 1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempatnya bekerja.
  - 2) Surat keterangan pajak penghasilan atau.
  - 3) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

- d. Ada atau tidaknya jaminan suami akan berlaku adil kepada isteri-isteri dan anak-anaknya dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dengan bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Dalam hal seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang harus mendapat izin dari pengadilan, izin itu harus diajukan ke Pengadilan Agama. Dan untuk mendapatkan izin dari pengadilan, harus memenuhi beberapa syarat tersebut dan disertai alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh pengadilan, sebagaimana hal yang telah dijelaskan dalam pasal 4, 5 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.<sup>51</sup>

## 2. Syarat-Syarat Poligami Menurut Hukum Islam

Syari'at Islam memperbolehkan berpoligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara isteri yang kaya dengan isteri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang rendah atau dari golongan bawah. Bila suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka ia diharamkan berpoligami. Bila yang sanggup dipenuhinya hanya tiga, maka baginya haram menikah dengan empat orang. Jika ia hanya sanggup memenuhi hak dua orang isteri. Maka haram baginya menikahi tiga orang. Begitu juga kalau ia khawatir berbuat zalim dengan mengawini dua orang perempuan, Maka haram baginya melakukannya.

---

<sup>51</sup>Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Liberty, 1982) hlm, 77-78.

Firman Allah SWT dalam surat An-nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ  
وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ٣

Artinya : "Apabila kalian takut tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim (yang kamu kawini), maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budakmu. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berlaku aniaya." (Q.S.An-Nisa:3)<sup>52</sup>

Berdasarkan surat An-Nisa'ayat 3 di atas, terdapat ketentuan bahwa syarat seseorang boleh melakukan poligami adalah sanggup berlaku adil terhadap para isteri-isterinya. Keadilan yang dituntut dan disyari'atkan dalam poligami ini adalah keadilan materi dalam memenuhi tempat kediaman, pakaian, nafkah, pergaulan, bersenggama dan semua aspek yang masih dalam batas-batas kemampuan manusia. Adapun keadilan dalam perasaan hati dan getaran jiwa, tidaklah bisa dipenuhi oleh seorang manusia sekalipun.

Dalam pada itu, meskipun seorang isteri menginginkan keadilan yang seadil-adilnya tetapi seorang suami tidak akan pernah sanggup untuk berlaku adil. Hal ini tersebut dalam firman Allah SWT surat An-Nisa'ayat 129 yang berbunyi sebagai berikut :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوا  
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ١٢٩

Artinya: "Dan kalian sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka

<sup>52</sup>Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 61.



*Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS An-Nisa’: 129)<sup>53</sup>*

Akan tetapi, apabila seorang muslim ingin poligami sedangkan ia yakin bahwa dirinya tidak mampu menerapkan keadilan di antara isteri-isterinya, maka hal itu adalah dosa di sisi Allah, dan wajib baginya untuk tidak berpoligami.

Mengawini perempuan lebih dari seorang, menurut hukum Islam diperbolehkan dengan dibatasi paling banyak adalah empat orang isteri sebagaimana yang disebutkan dalam Surat An-Nisa’ di atas. Sedangkan kebolehan poligami ini hanyalah dalam keadaan darurat atau kondisi terpaksa.

Namun apabila suami khawatir berbuat zalim dan tidak dapat memenuhi hak-hak mereka semua, maka diharamkan bagi mereka untuk berpoligami dan cukuplah ia beristeri satu saja.

Para *mufassir* sepakat bahwa An-Nisa’ ayat 3 dan 129 adalah dasar hukum yang memperbolehkan seseorang untuk berpoligami tetapi dalam keadaan yang darurat. Menurut jumhur ulama’, kedua ayat ini turun sesuai perang uhud, di mana ketika itu banyak pejuang muslim (para mujahidin) yang gugur di medan perang. Sebagai konsekuensinya, banyak anak yatim dan janda yang di tinggal mati oleh ayah dan suaminya. Akibatnya banyak anak yatim yang terabaikan dalam kehidupan, pendidikan dan masa depannya.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup>*Ibid*, hlm. 144.

<sup>54</sup>Khoirudin Nasution, *Riba dan Poligami* (Yogyakarta: Academia, 1996), hlm. 85.

Poligami ini adalah merupakan suatu pengecualian yang disertai dengan syarat dan pembatasan-pembatasan antara lain:

1. Jumlah perempuan yang dikawini tidak boleh melebihi dari empat orang, seperti yang tersebut dalam surat An-Nisa' ayat 3.
2. Akan sanggup berlaku adil terhadap semua isteri-isterinya. Jika sudah merasa tidak bisa berlaku adil lagi dengan semua isterinya, maka sebaiknya jangan kawin lagi untuk yang kedua kalinya.
3. Perempuan yang akan dikawini sebaiknya adalah perempuan yang mempunyai anak yatim, dengan maksud supaya anak yatim itu berada di bawah pengawasan laki-laki yang berpoligami tersebut.
4. Perempuan-perempuan yang dikawini itu tidak boleh ada hubungan saudara, baik sedarah maupun sesusuan.<sup>55</sup>

Dalam hukum Islam, masalah izin isteri dalam poligami tidak disyaratkan secara Syar'i dan tidak ada dalil yang menetapkan keharusannya, karena yang menjadi syarat utama bagi suami yang ingin berpoligami adalah mampu untuk berlaku adil terhadap para isterinya.

#### E. Hukum Poligami

Kata-kata kunci hukum dalam persoalan pernikahan bahwa Islam tidak memberikan hukum wajib atau haram kepada perbuatan amal ibadah dalam pernikahan monogami maupun poligami. Karena asal muasal hukum pernikahan adalah sunnah Rasulullah SAW. Begitu juga dengan

---

<sup>55</sup>Soemiyati. *Op. Cit.*, hlm. 75.

hukum poligami, yaitu menjadi mubah karena mengikuti keadaan seseorang yang mengalaminya. Sesuai dengan Q.S.An-Nisa: 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُواهَا  
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ١٢٩

Artinya: "Dan kalian sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS An-Nisa': 129)<sup>56</sup>

Sejalan dengan bunyi hadits:

عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ غَيَّلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّقْفِيَّ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ  
عَشْرُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ أ  
خَبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، حَدِيثَ غَيَّلَانَ.

Artinya: " Dari salim, dari ayahnya Radiallaahu anhu bahwa Ghalian Ibnu Salamah masuk Islam dan ia memiliki sepuluh orang isteri dan ia yang juga masuk Islam bersamanya. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wa Sallam menyuruhnya untuk memilih empat orang isteri diantara mereka dan ceraikan selebihnya. Hadits ini didapat dari Imam Malik dan Zuhri, Hadits Ghallan.<sup>57</sup>

Mengawini wanita lebih dari seorang, menurut hukum Islam diperbolehkan dengan dibatasi paling banyak adalah empat orang isteri sebagaimana yang disebutkan dalam Surat An-Nisa' dan hadist di atas. Sedangkan kebolehan poligami ini hanyalah bersifat darurat atau kondisi terpaksa.

Namun apabila suami khawatir berbuat zalim dan tidak dapat memenuhi hak-hak mereka semua, maka diharamkan bagi mereka untuk berpoligami dan cukuplah ia beristeri satu saja.

<sup>56</sup>Departemen Agama RI. *Op. Cit.*, hlm. 144.

<sup>57</sup>Imam Asy Syaf'i. *Op. Cit.*, hlm. 519.

Para *mufassir* sepakat bahwa An-Nisa' ayat 3 dan 129 adalah dasar hukum yang memperbolehkan seseorang untuk berpoligami. Menurut jumhur ulama', kedua ayat ini turun se usai perang uhud, di mana ketika itu banyak pejuang muslim (para mujahidin) yang gugur di medan perang. Sebagai konsekuensinya, banyak anak yatim dan janda yang ditinggal mati oleh ayah dan suaminya. Akibatnya banyak anak yatim yang terabaikan dalam kehidupan, pendidikan dan masa depannya.<sup>58</sup>

Para penafsir Al-Quran klasik, berpendapat bahwa maksud utama ayat di atas adalah untuk berbuat keadilan, baik kepada anak-anak yatim maupun para isteri. Melindungi kepentingan anak yatim ini sama pentingnya dengan menjamin perlakuan yang sama dan adil kepada perempuan yang dikawini, yakni orang-orang yang menjadi wali anak yatim ini. Dengan demikian, akan terlihat bahwa Al-Quran ingin sekali melindungi kepentingan kaum perempuan dan memberikan keadilan kepada mereka, baik sebagai anak yatim maupun sebagai isteri.<sup>59</sup>

Ibnu Jarir at-Tabari berpendapat bahwa makna surat An-Nisa' ayat 3 ini merupakan kekhawatiran akan ketidakmampuan seorang wali berbuat adil terhadap harta anak yatim. Maka kalau sudah khawatir terhadap harta anak yatim, mestinya khawatir juga terhadap wanita. Maka janganlah menikahi mereka kecuali dengan wanita yang kalian yakin bisa berbuat adil, satu sampai empat wanita.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup>Khoirudin Nasution. *Op. Cit.*, hlm. 85.

<sup>59</sup>Asgar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 113.

<sup>60</sup>Khoirudin Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 85.

Menurut Abduh, disinggungnya persoalan poligami dalam konteks pembicaraan anak yatim adalah karena keduanya terkandung persoalan yang sangat mendasar yaitu tentang ketidakadilan. Anak yatim seringkali menjadi korban ketidakadilan karena mereka tidak terlindungi. Sedangkan dalam poligami yang menjadi ketidakadilan adalah kaum perempuan.<sup>61</sup>

Secara eksplisit, Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha tidak setuju terhadap praktik poligami yang ada dalam masyarakat. Meskipun secara normatif poligami diperbolehkan (dalam kondisi tertentu), namun mengingat persyaratan yang sulit untuk diwujudkan (keadilan bagi isteri-isterinya), maka poligami sebetulnya tidak dikehendaki oleh al-Qur'an.<sup>62</sup> Mereka memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau mudaharat dari pada manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya mempunyai watak yang cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Dengan demikian poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga.<sup>63</sup>

Asgar Ali Engineer dan Amina Wadud Muhsin mengatakan, sebenarnya ayat di atas lebih menekankan pada berbuat adil terhadap anak-anak yatim, bukan mengawini lebih dari seorang perempuan. Karena konteks ayat ini adalah tentang kondisi pada masa itu di mana mereka yang memelihara kekayaan anak yatim sering berbuat tidak semestinya,

---

<sup>61</sup>Musdah Mulia. *Op. Cit.*, hlm. 35.

<sup>62</sup>Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan* (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2003), hlm. 330.

<sup>63</sup>Abdul Rahman Ghazali. *Op. Cit.*, hlm. 130.



dan terkadang mengawini mereka tanpa mahar. Jadi ayat-ayat di atas harus dipahami menurut konteksnya, bukan pembolehan poligami yang bersifat umum.<sup>64</sup>

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *khouf* (takut) dalam ayat tersebut adalah *al-‘ilmu* (tahu). Jadi maksudnya, jika kamu tahu atau punya dugaan kuat bahwa kamu tidak dapat menghindarkan diri dari perbuatan aniaya dan tidak adil terhadap perempuan atau isterimu, janganlah kamu mengawini lebih dari empat agar kamu dapat berlaku adil.<sup>65</sup>

Syawkani menyebutkan bahwa turunnya ayat ini untuk menghapus kebiasaan orang Arab pra-Islam yang menikahi wanita tanpa batas. Kemudian Syawkani menekankan haramnya menikahi wanita lebih dari empat. Penolakannya terhadap pendapat yang membolehkan menikahi wanita sampai sembilan, didasarkan pada dua alasan. Pertama, bertentangan dengan sunnah Nabi, bahwa Nabi hanya membolehkan para sahabatnya mempunyai isteri maksimal empat wanita. Kedua, bertentangan dengan pemahaman bahasa Arab, baik dari tata bahasa Arab yang umum, maupun dari tinjauan *nazom* al-Qur'an. Maka menurutnya, pendapat yang membolehkan mempunyai isteri lebih dari empat merupakan pendapat yang tidak bisa memahami bahasa Arab dengan benar.<sup>66</sup>

---

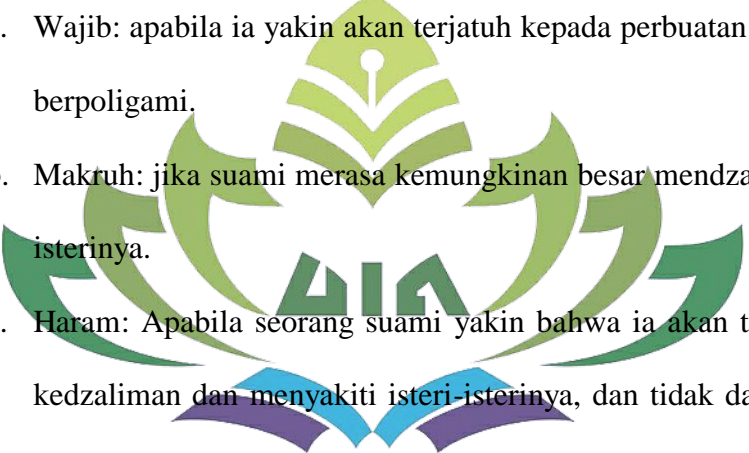
<sup>64</sup>Nurjannah Ismail. *Op. Cit.*, hlm. 329.

<sup>65</sup>Musdah Mulia. *Op. Cit.*, hlm. 38.

<sup>66</sup>Khoirudin Nasution. *Op. Cit.*, hlm. 89.

Menurut Quraish Shihab, ayat ini tidak membuat peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai agama serta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini. Ayat ini juga tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, tetapi hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itupun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh seseorang yang benar-benar membutuhkannya dan dengan syarat yang tidak ringan.<sup>67</sup>

Adapun hukum dari pada poligami itu sendiri adalah :

- 
- a. Wajib: apabila ia yakin akan terjatuh kepada perbuatan zina jika tidak berpoligami.
  - b. Makruh: jika suami merasa kemungkinan besar mendzalimi salah satu isterinya.
  - c. Haram: Apabila seorang suami yakin bahwa ia akan terjatuh kepada kezaliman dan menyakiti isteri-isterinya, dan tidak dapat memenuhi hak-hak mereka dengan adil, maka poligami menjadi haram. Dan poligami diharamkan bagi mereka yang mempunyai kekhawatiran tidak dapat berbuat adil.
  - d. Sunat: Apabila seorang lelaki memerlukan isteri yang lain: contohnya, beliau tidak cukup dengan hanya beristeri satu, atau isteri pertamanya sakit atau madul sedangkan beliau amat menghendaki anak dan dia merasa mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya.<sup>68</sup>

<sup>67</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hlm. 324.

<sup>68</sup>Musdah Mulia, *Memahami Keadilan dalam Poligami* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 32-33.

### **BAB III**

#### **A. Gambaran Umum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

##### **1. Sejarah dan Perkembangan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Raden Intan Lampung merupakan salah satu dari lima Fakultas di lingkungan IAIN Raden Intan Lampung saat ini. Keberadaan Fakultas ini mempunyai sejarah yang panjang sejak didirikan pada tahun 1968. Sejarah berdirinya Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung tidak terlepas dari sejarah berdirinya IAIN Raden Intan Lampung, yaitu melalui musyawarah Alim Ulama Daerah Lampung di Metro sebagai ibu kota Lampung Tengah ketika itu, dalam rangka membentuk Yayasan Sejahtera Islam Lampung (YKIL) pada tahun 1963, yang membidangi berdirinya Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI). Pada tahun itulah (1963) berdirinya PTAI dengan membuka 2 (dua) Fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syari'ah di Lampung di bawah binaan dan santunan YKIL dengan lokasi perkantoran dan perkuliahan ditempatkan di aula Fakultas Hukum Unsri jalan Hasanuddin No. 1 Telukbetung. Setelah berjalan beberapa bulan perkuliahan kedua Fakultas tersebut dialihkan ke Masjid Jami' Lungsir Telukbetung, yang sekarang bernama masjid Jami' al-Furqon. Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan dinegrikan bersamaan dengan peresmian IAIN Raden Intan Tanjungkarang dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Agama RI Nomor 187 Tahun 1968 tanggal 26 Oktober 1968 pada masa kepemimpinan Rektor pertama Mukhtar

Hasan, S.H. yang berlokasi di Jalan Raden Fattah Kaliawi Tanjungkarang. Pada masa transformasi menjadi perguruan tinggi negeri berdasarkan SK Menteri Agama RI No. 187 tahun 1968, Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung memiliki dua jurusan yaitu Jurusan Peradilan Agama atau Qodho' dan Jurusan Perdata Pidana Islam. Sesuai dengan kebijakan Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama) pada tahun 1995, maka dua jurusan tersebut dikembangkan menjadi tiga program studi, yaitu *al-Ahwal al-Syakhsyah* (AS) atau hukum keluarga/perdata, *Mu'amalah* (M) atau Hukum Ekonomi dan Bisnis, dan *Jinayah Siyasah* (JS) yang kemudian berubah menjadi jurusan *Siyasah* (S) atau Hukum Tata Negara. Pada tahun 2006 Fakultas Syari'ah membuka lagi jurusan Ekonomi Islam (EI) dan pada tahun 2013 dibuka lagi jurusan baru Perbankan Syari'ah (PS). Jadi sampai pertengahan tahun 2015 Fakultas Syari'ah menyelenggarakan lima jurusan, yaitu Hukum Keluarga, Hukum Ekonomi dan Bisnis, Hukum Pidana dan Politik, Ekonomi Islam dan Perbankan Syari'ah, sedangkan pada tahun 2016 Fakultas Syari'ah menyelenggarakan konsentrasi ilmu hukum dan kelas internasional. Sejalan dengan pengembangan kelembagaan yang dilakukan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Islam (Dirjen Pendis), maka pada tahun 2015 dibuka fakultas baru yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) sebagai pengembangan (pecahan) dari Fakultas Syari'ah. Dua jurusan yang ada sebelumnya ada di Fakultas Syari'ah yaitu Ekonomi Islam dan Perbankan Syari'ah turut dipindah keseluruhannya, baik mahasiswa lama dan baru maupun dosennya, ke FEBI tersebut. Dengan demikian Fakultas Syari'ah

menyelenggarakan empat jurusan, yaitu Hukum Keluarga (AS), Hukum Ekonomi dan Bisnis (M), Hukum Pidana dan Politik yang berubah menjadi Hukum Tata Negara atau Siyasah (S) dan Ilmu Hukum (IH), tersebut dibentuknya kelas internasional untuk jurusan Siyasah.<sup>69</sup>

## 2. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

a. **Visi:** Menjadikan Fakultas yang unggul dan kompetitif dalam pendidikan, pengkajian dan pengembangan hukum Islam dan ilmu hukum secara integratif, yang berwawasan keIslamian, kemanusiaan, dan keIndonesiaan, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional.<sup>70</sup>

### b. Misi :

- 1) Melaksanakan pendidikan yang berkualitas dalam hukum Islam dan ilmu hukum terkait secara integratif, baik dalam bidang hukum perdata atau keluarga, hukum ekonomi, hukum tata negara, hukum pidana, dan sebagainya.
- 2) Melakukan penelitian, pengkajian dan pengembangan hukum Islam dan ilmu hukum terkait dibidangnya.
- 3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidangnya serta kerjasama yang simbiotif dengan berbagai lembaga dalam dan luar negeri.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup>Fathul Mu'in, ed. Profil Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Raden Intan Lampung 2016 (Lampung: Fakultas syari'ah dan Hukum IAIN Raden Intan Lampung 2016), hlm. 7.

<sup>70</sup>*Ibid*, hlm. 11.

<sup>71</sup>*Ibid*.

**c. Tujuan:**

- 1) Melahirkan sarjana hukum yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.
- 2) Menghasilkan sarjana hukum bidang keIslamian dan ilmu hukum yang ahli dan profesional dalam memutuskan dan menyelesaikan persoalan hukum yang terjadi serta melaksanakan tugas pelayanan masyarakat sesuai dengan disiplin keahlian hukum.<sup>72</sup>

**3. Struktur Organisasi Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Struktur organisasi Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung periode 2015-2019 terdiri dari pimpinan fakultas, sub-sub bagian, jurusan/program studi, lembaga-lembaga atau pusat-pusat kajian. Struktur tersebut dapat dilihat dalam uraian di bawah ini:

**a. Pimpinan**

- 1) Dekan : Dr. Alamsyah, M.Ag.
- 2) Wakil Dekan I : Dr. H. Khairuddin, M.H.
- 3) Wakil Dekan II : Drs. H. Haryanto, M.H.
- 4) Wakil Dekan III : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.

**b. Kepala Bagian Tata Usaha dan Kasubag**

- 1) Kabag Tata Usaha : Hartono Wibowo, SE., M.M.
- 2) Kasubag Akademik dan : Drs. Muhammad Qirom  
Kemahasiswaan
- 3) Kasubag Umum : Dra. Nabilah

---

<sup>72</sup>*Ibid.*



c. Ketua-Ketua Prodi

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1) Ketua Jurusan AS       | : Marwin, S.H., M.H.                       |
| Sekretaris                | : Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.       |
| 2) Ketua Jurusan Muamalah | : Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag.,<br>M.H. |
| Sekretaris                | : Khoirudin, S.Th.I., M.S.I.               |
| 3) Ketua Jurusan Siyash   | : Drs. Susiadi AS, M.Sos.I.                |
| Sekretaris                | : Frenki, S.E.I., M.S.I. <sup>73</sup>     |

**4. Program Studi Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada saat ini memiliki 3 jurusan atau program studi sebagai berikut:

**a. Prodi Hukum Keluarga (*Al-Ahwal Al-Syakhsyah*)**

Jurusan (Prodi) ini menyiapkan sarjana muslim yang mempunyai keahlian di bidang hukum keluarga dalam Islam (Perkawinan, waris, wakaf, hibah, wasiat, dan lain-lain). Mampu mengkaji mendalam dan meneliti problematika hukum keluarga serta mampu mengembangkan teori dan konsep hukum keluarga dalam Islam sehingga diharapkan dapat diaplikasikan dan disebarluaskan dalam masyarakat. Program Studi Hukum Keluarga (*Al-Ahwal Al-Syakhsyah*) ini telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dengan nilai A.<sup>74</sup>

- 1) Visi:** Program Studi Hukum Perdata/Hukum Keluarga (*Al-Ahwal Al-Syakhsyah*) ini adalah menjadi pusat pendidikan, pengkajian, dan

<sup>73</sup>*Ibid*, hlm. 16-17.

<sup>74</sup>*Ibid*, hlm. 20.

pengembangan Hukum Perdata/Hukum Keluarga berbasis ilmu syari'ah, yang unggul, kompetitif, inovatif dan responsif terhadap perkembangan persoalan kemanusiaan dan berdaya saing global pada tahun 2023.<sup>75</sup>

## 2) Misi:

- a) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang perdata/Hukum Keluarga, baik yang bersifat teoritis maupun praktis.
- b) Melakukan pengkajian dan pengembangan ilmu syari'ah dan ilmu hukum di bidang hukum perdata yang berbasis penelitian.
- c) Melaksanakan pengabdian pada masyarakat guna membangun kehidupan keluarga harmonis berdasarkan hukum keluarga serta menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga luar.<sup>76</sup>

## 3) Tujuan :

- a. Menghasilkan sarjana hukum yang beriman, bertakwa, dan berkhilafat mulia.
- b. Menghasilkan sarjana yang menguasai hukum keluarga dan hukum keperdataan, baik hukum Islam maupun ilmu hukum, serta maupun menyelesaikan persoalan dan melakukan pelayanan sesuai dengan bidang keahliannya.<sup>77</sup>

### b. Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)

Jurusan ini menyiapkan sarjana muslim yang mempunyai keahlian dalam sidang Muamalah, dengan kajian utama Hukum Perikatan dan Bisnis Syari'ah serta menyiapkan mahasiswa untuk memiliki pengetahuan tentang kaidah-

<sup>75</sup>*Ibid.*

<sup>76</sup>*Ibid.*

<sup>77</sup>*Ibid.*

kaidah muamalah kebendaan, hak milik dan sosial budaya, memiliki keterampilan dalam manajemen perusahaan, asuransi dan lembaga keuangan Islam lainnya. Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah atau *Mu'amalah* ini telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dengan nilai A.<sup>78</sup>

1) **Visi:** Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah adalah menjadi pusat pendidikan, pengkajian, dan pengembangan Hukum Ekonomi berbasis ilmu Syari'ah yang unggul, kompetitif, inovatif dan responsif terhadap perkembangan hukum dan ekonomi yang berdaya saing global pada tahun 2023.<sup>79</sup>

2) **Misi:**

- a. Melaksanakan pendidikan, pengkajian dan pengembangan Hukum Ekonomi dan ilmu ekonomi berbasis syari'ah baik teoritis maupun praktis.
- b. Mengembangkan sistem ekonomi dan lembaga keuangan dengan berbasis kepada prinsip-prinsip syari'ah.
- c. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat di bidang Hukum dan Ekonomi Syari'ah serta menjalin kerjasama yang baik dan menguntungkan dengan lembaga-lembaga terkait, pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri.<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup>*Ibid*, hlm. 22.

<sup>79</sup>*Ibid*.

<sup>80</sup>*Ibid*.

### 3) Tujuan:

- a. Menghasilkan sarjana hukum yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia dan memiliki penguasaan hukum ekonomi syari'ah.
- b. Menghasilkan serjana yang mampu menyelesaikan persoalan hukum dan ekonomi kemasyarakatan yang terjadi dan melaksanakan pelayanan sesuai dengan disiplin keahlian di bidang hukum ekonomi syari'ah.<sup>81</sup>

#### c. Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah*) bertujuan meyiapkan sarjana muslim yang mengetahui Hukum Tata Negara yang memiliki keterampilan dalam memberikan pendapat atau fatwa dalam Hukum Pidana Islam serta mempunyai Kompetensi tentang konstalasi dan pengembangan Ilmu Tata Negara dan Pemerintahan dalam Islam serta mengaplikasiannya. Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) ini telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dengan nilai B.<sup>82</sup>

- 1) **Visi:** Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) adalah menjadi pusat pendidikan, pengkajian, dan pengembangan ilmu hukum tata negara yang berbasis ilmu syari'ah dan ilmu hukum yang unggul, kompetitif, inovatif, dan responsif terhadap perkembangan persoalan kontemporer dan berdaya saing global pada tahun 2023.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm. 24.

<sup>83</sup> *Ibid.*

## 2) Misi:

- a) Melaksanakan pendidikan dan pengajaran hukum tata negara yang berbasis ilmu-ilmu syari'ah dan ilmu hukum, baik teoritis maupun praktis.
- b) Melakukan pengkajian dan pengembangan Hukum Tata Negara dengan berbasis penelitian.
- c) Melakukan pengabdian untuk membangun sistem ketatanegaraan dan pemerintahan sesuai dengan nilai-nilai prinsip syari'ah.
- d) Menjalin kerjasama yang baik dan menguntungkan dengan lembaga-lembaga terkait, pemerintahan dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri.<sup>84</sup>

## 3) Tujuan:

- a) Menghasilkan sarjana hukum yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia.
- b) Menghasilkan sarjana yang menguasai hukum tata negara dan pemerintahan serta mampu mengimplementasikannya sesuai dengan nilai-nilai syari'ah.
- c) Menghasilkan sarjana yang mampu menyelesaikan persoalan tata negara, pemerintahan dan perundang-undangan yang terjadi dan melakukan pelayanan sesuai dengan keahliannya di bidang hukum tata negara.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup>*Ibid.*

<sup>85</sup>*Ibid.*

## 5. Paradigma Keilmuan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pendidikan di Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Raden Intan Lampung dirancang untuk mencetak sarjana hukum yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, yang menguasai hukum Islam dan ilmu hukum terkait sesuai bidangnya, secara integratif dan interdisipliner dan memiliki wawasan keIslaman, kemanusiaan dan ke Indonesiaan yang kokoh dan mendalam. Struktur keilmuan atau *the body of knowledge* Fakultas Syari'ah dan Hukum berakar dari al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumbernya, yang ketika ditafsirkan melalui ilmu al-Qur'an dan al-Hadis, lalu melahirkan ilmu fiqh atau ilmu hukum Islam, sebagai bagian dari ilmu-ilmu keIslaman secara umum. Sebagai ilmu yang memuat aturan-aturan praktis kehidupan manusia, maka ilmu fiqh terpolarisasi menjadi ilmu bidang besar hukum Islam, yaitu fiqh ibadah (hukum ibadah ritual), fiqh mu'amalah (hukum ekonomi-bisnis), fiqh munakahat (hukum keluarga/perdata), fiqh jinayah (hukum pidana), dan fiqh siyasah (hukum tata negara dan politik).

Oleh karena itu, kajian-kajian hukum keluarga dengan mata kuliah inti fiqh munakahat dilakukan secara terpadu dengan hukum perdata, psikologi hukum keluarga, mediasi dan advokasi. Kajian hukum ekonomi berbasis pada fiqh mu'amalah dilaksanakan secara menyatu dengan kajian ilmu ekonomi dan ilmu sosial umumnya. Demikian pula kajian hukum tata negara yang berbasis kepada kajian fiqh siyasah diintegrasikan dengan berbasis disiplin ilmu terkait, seperti ilmu hukum tata negara, ilmu politik, dan sebagainya.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup>*Ibid*, hlm. 26-27.



## B. Dosen Tetap Yang Menjadi Narasumber di Fakultas Syari'ah UIN Raden

### Intan Lampung

Obyek dalam penelitian ini adalah dosen yang memiliki kompetensi dalam bidang fiqh secara umum dan fiqh munakahat secara khususnya di Fakultas Syari'ah. Hal ini sesuai dengan penelitian yang membahas mengenai Cacat badan sebagai alasan poligami. Tetapi hanya dosen tetap saja yang menjadi informan. Adapun dosen tetap Fakultas Syari'ah yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu:

1. Khoirul Abror.

Beliau merupakan dosen mata kuliah fiqh ibadah di fakultas syari'ah dan beliau juga telah menulis buku mengenai Hukum Perkawinan dan Perceraian yang menjelaskan bahwa beliau pun membidangi ilmu *fiqh munakahat*.

2. H. Mundzir HZ.

Beliau merupakan dosen yang mengajar mata kuliah dibidang *ilmu fiqh, usul fiqh*, tafsir di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dan pernah menjabat sebagai wakil dekan di fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

3. H. Muhammad Zaki.

Beliau adalah pernah menjabat sebagai ketua prodi jurusan *Ahwal al-Syakhsiyah* dan salah satu dosen tetap serta pengajar akademisi di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampun salah satu dosen yang membidangi *ilmu hadits* dan *fiqh munakahat* di jurusan *Al-Akhwil Al-Syakhsiyah*.

4. Jayusman.

Beliau merupakan pengajar staf akademisi yang membidangi *ilmu fiqih* di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, serta beliau saat ini menjabat sebagai ketua jurusan *Ahwal al-syakhsiyah* di Pasca Sarjana UIN Raden Intan Lampung.

5. Hj. Linda Firdawaty.

Beliau adalah dosen tetap dan pengajar di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang membidangi hukum perdata dan hukum acara peradilan agama.

6. Hj. Zuhraini.

Beliau merupakan dosen yang mengajar mata ilmu hukum dan hukum acara perdata di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung serta beliau pernah menjabat sebagai ketua prodi jurusan *Ahwal al-Syakhsiyah* di Pasca Sarjana UIN Raden Intan Lampung.

7. Yufi Wiyos Rini Masykuroh.

Beliau merupakan dosen yang mengajar mata kuliah Fiqih Ibadah di Fakultas UIN Raden Intan Lampung dan dosen fakultas syari'ah yang membidangi dalam hal BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan).

**C. Pandangan Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Terhadap Cacat Badan Sebagai Alasan Poligami.**

Poligami merupakan ikatan perkawinan di mana salah satu pihak (suami) mengawini beberapa isteri (lebih dari satu) dalam waktu yang bersamaan. Pada

dasarnya sistem perkawinan di Indonesia ini sendiri menganut sistem Monogami, tetapi sistem tersebut bukanlah bersifat mutlak adanya, dikarenakan di dalam pasal yang sama yaitu Pasal 3 Ayat 2 BAB I “Dasar Perkawinan” Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa “Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Yang mana apabila seorang suami berkeinginan untuk beristeri lebih dari seorang maka ia harus mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya, dan pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: a, Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. b, Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. c, Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Hal inilah yang disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.

Beberapa tanggapan dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung mengenai cacat badan sebagai alasan poligami yang mempunyai spesifikasi dalam bidang ilmu Hukum Perkawinan dan Hukum Perdata yaitu dosen-dosen yang menguasai dan mengajar dalam bidangnya. Terdapat beberapa pertanyaan yang diajukan mengenai cacat badan sebagai alasan poligami, antara lain 1. Mengenai tanggapan terhadap poligami, 2. Tanggapan serta pandangan terhadap Pasal 4 ayat 2 dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 yang menyebutkan jika cacat badan dapat mendorong seorang suami untuk mengajukan permohonan poligami kepada pengadilan, sehingga secara tidak langsung telah memberikan celah kepada seorang suami untuk melakukan

poligami, 3. Apa saja yang menjadi kriteria cacat badan sehingga dapat mendorong suami untuk berpoligami dalam hubungan rumah tangga, 4. Sependapat atau tidaknya terkait ungkapan “poligami merupakan jalan keluar yang harus ditempuh untuk menyelesaikan masalah dalam hubungan rumah tangga”, agar dapat tetap mempertahankan konsep keharmonisan dalam rumah tangga tersebut, 5. Bagaimana pandangan serta penilaian terhadap seorang atau keluarga yang melakukan praktik poligami dalam kehidupan rumah tangganya. Berikut merupakan hasil wawancara beserta uraian jawaban dari beberapa pertanyaan yang diajukan:

1. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap poligami?

Jawaban: Bapak Khoirul Abror menuturkan pendapatnya jika poligami merupakan hal yang diperbolehkan apabila dibalik pelaksanaannya poligami tersebut ada alasan atau sebab-sebab tertentu yang dapat dibenarkan untuk melakukan poligami dan pendapat poligami dari bapak Khoirul Abror ini pun sejalan dengan narasumber lainnya, seperti bapak H Mundzir HZ dan bapak H Muhammad Zaki yang menyebutkan jika poligami adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan, namun pak H Mundzir HZ menambahkan jika poligami dapat ditempuh apabila keadaan tersebut termasuk ke dalam hal yang darurat yang mana poligami dilakukan sebagai jalan alternatif bagi suatu rumah tangga untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, terlepas dari diperbolehkannya poligami bapak Khoirul Abror menyebutkan jika pelaksanaan poligami terdapat syarat-syarat yang harus ditempuh salah satunya ialah harus ada izin dari isteri pertama, karena pada dasarnya poligami tentu diperbolehkan hanya saja sistem

pernikahan di Indonesia menganut asas monogami yang artinya hanya pernikahan tunggal atau satu pernikahan, tetapi tetap dalam hal-hal tertentu poligami diperbolehkan apabila dalam pelaksanaannya dengan cukup alasan sebagaimana yang telah ditulis dalam Undang-Undang Dasar tentang Perkawinan. Tak luput juga bapak H Mundzir HZ dan bapak H Muhammad Zaki juga memberikan dalil atau dasar hukum yang membahas terkait poligami di dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعٍ فَإِنَّ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ﴿٤﴾

Bapak H. Mundzir HZ menjelaskan maksud dari ayat di atas disebutkan menikahi perempuan lebih dari satu diperbolehkan sebagaimana telah disebutkan dalam ayat di atas, apabila dapat dan yakin untuk berlaku adil dan maksud dari kata adil di sini dapat memberikan serta mencukupi kebutuhan isteri-isteri dan anak-anaknya nanti, jika adil dalam arti kecintaan Rosulullah SAW sendiri dalam sabdanya maka inilah kemampuanku lebih dari ini aku tidak mampu, yang artinya batas keadilan manusia yang ditekankan dalam ayat ini yaitu dalam segala hal, baik itu secara materi lahiriyah dan batiniahnya. Sehingga beliau menyimpulkan jika poligami itu memang sah-sah saja dan diperbolehkan tetapi poligami sendiri bukanlah hukum asal artinya dibenarkan dan diperbolehkan dalam keadaan tertentu, karena di dalam tujuan agama Islam itu ada 5 hal yang harus dipelihara: 1. Agama, 2. Harta, 3. Keturunan, 4. Darah, 5. Kehormatan. Agama Islam merupakan agama yang indah dan sempurna serta penuh akan toleransi di dalamnya artinya agama tidak akan membunuh karakter

manusia atau manusia itu sendiri. Sedangkan bapak H Muhammad Zaki memberikan penjelasan terkait ayat di atas jika poligami haruslah berlaku adil dalam pelaksanaannya, jika merasa tidak bisa atau tidak sanggup untuk berlaku adil cukuplah satu pernikahan saja atau hendaklah hanya memiliki isteri satu. Di dalam ayat ini terdapat pesan yang tersirat hendaklah memiliki satu isteri, tetapi di dalam Islam ayat ini juga turun dalam konteks di tengah-tengah masyarakat Arab, yang mana menikahi perempuan lebih dari satu adalah hal yang biasa dilakukan. Dan di dalam agama Islam diperkecil akan jumlah kepemilikan isteri ini yaitu hanya diperbolehkan menikahi 4 isteri saja serta hal ini tidak menutup kemungkinan dalam budaya-budaya negara lain. Sehingga beliau menarik kesimpulan jika poligami adalah hal yang diperbolehkan walaupun pada dasarnya negara kita Indonesia menganut dasar monogami dalam praktik pernikahan.

Lain hal terhadap bapak Jayusman yang menanggapi poligami lebih condong untuk melihat terhadap perspektif sejarah poligami ini sendiri, poligami bukanlah suatu praktik yang baru terjadi pada zaman nabi Muhammad saw., akan tetapi lebih merupakan sejarah yang telah lama. Sejarah membuktikan bahwa jauh sebelum kenabian Muhammad saw., poligami ini sesungguhnya telah dikenal masyarakat secara luas. Termasuk para nabi terdahulu seperti Nabi Ibrahim a.s. yang juga menikahi Siti Hajar di samping beristerikan Siti Sarah. Jadi, sama sekali tidak benar jika poligami dipersonifikasikan dengan sunnah *fi'liyyah* (perbuatan) nabi Muhammad saw., mengingat sebagian nabi-nabi Allah yang lain juga ada yang berpoligami. Hal penting yang layak dicatat berkenaan



dengan perkara poligami yang sering dijadikan bahan pertanyaan oleh sebagian kalangan yang tidak mentolerir kebolehan poligami. Semangat poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. jelas bukan dikarenakan motivasi nafsu biologis (seksual) seperti dituduhkan banyak pihak; melainkan lebih didorong oleh keinginannya untuk melindungi kaum perempuan, di samping dalam rangka dakwah Islamiyah. Kenyataan menunjukkan bahwa belasan perempuan yang pernah dinikahi (menjadi isteri) nabi Muhammad saw., apalagi yang dipoligami (sebanyak 9 orang) hanya seorang saja yang berstatus perawan (gadis), yakni Aisyah binti Abu Bakar r.a., sedangkan selebihnya, kecuali Hafshah binti Umar ibn al-Khattab r.a. Janda yang masih muda (berumur 20 tahun); adalah janda yang sudah tua berumur 40-an dan bahkan ada yang di atas 50-an tahun. Dengan datangnya Islam, konsep poligami yang telah mengakar sebelumnya pada masyarakat Arab pra Islam (jahiliyah) didefinisikan ulang. Islam membatasi jumlah isteri yang boleh dinikahi paling banyak empat orang saja.

Menurut Quraish Shihab, ayat QS al-Nisa': 3 menjadi dasar bolehnya poligami. Namun demikian, ayat ini tidak membuat satu peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh syari'at agama dan adat istiadat sebelum Islam. Ayat ini juga tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya. Ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami, itu pun merupakan pintu darurat kecil, yang hanya dilalui saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan. Hukum Islam tidak menutup kemungkinan seorang lelaki untuk berpoligami. Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 4 menjelaskan bahwa seorang suami jika akan beristri lebih dari

seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 menjelaskan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Tanggapan ibu Hj Linda Firdawaty terhadap poligami dalam hal ini beliau memandang jika poligami adalah sesuatu yang dapat dibenarkan yang terpenting suami sanggup dan mampu untuk berlaku adil, di dalam agama Islam maka adil lah yang dijadikan alasan agar dapat berpoligami, tapi tetap pada dasarnya negara kita ini menganut asas monogami dalam pernikahan. Maka cara pelaksanaan poligami ini sendiri pada dasarnya dipersulit kenapa demikian untuk mewujudkan kata adil di dalam hubungan poligami bukanlah perkara yang mudah untuk dilaksanakan oleh seorang suami. Terlepas dari hal yang saya sampaikan di atas saya sendiri tidak setuju terhadap poligami

dikarenakan pada dasarnya naluri lelaki berkeinginan untuk melakukan poligami meskipun isteri dalam keadaan sehat-sehat saja dan telah memberikan sang suami keturunan, hal ini disebabkan oleh nafsu akan ketidakpuasan sang suami terhadap apa yang telah dimilikinya.

Sedangkan ibu Hj Zuhraeni menanggapi poligami merupakan salah satu hukum perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, artinya agama Islam dalam perspektif hukum keluarga memberikan izin dan memperbolehkan poligami. Tetapi jika poligami dipraktikan ke dalam hukum keluarga di Indonesia Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 menganut perinsip monogami, maka poligami adalah hal yang amat sulit untuk dipraktikan di negara Indonesia. Dan jika kita melihat dalam al-Qur'an firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 3 disebutkan dan memang diperbolehkan untuk berpoligami. Dalam berbicara tentang poligami hendaklah dibahas secara teks dan konteksnya seperti apa, karena di Indonesia untuk budaya dan tradisi yang berkaitan dengan poligami, harus disangkutpautkan dengan kaitan faktor ekonomi, terlebih konteks pandangan di tengah-ditengah masyarakat terutama untuk perempuan akan timbul pandangan yang berbeda yaitu jika poligami dilakukan timbulalah pandangan yang terbentuk di tengah-tengah masyarakat sebagaimana pada umumnya dan menimbulkan pandangan posisi isteri pertama akan tergantiakan dengan isteri yang kedua. Tapi poligami yang dianjurkan dan dipraktikan oleh Rasulullah amatlah berbeda, poligami yang dilakukan beliau di dalamnya terdapat visi dan misi yang mulia untuk kemaslahatan bagi umatnya. Sedangkan poligami yang terjadi di Indonesia berbalik 360 derajat

dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah, pada praktiknya banyak yang berpoligami karena dilandasi oleh maksud dan tujuan-tujuan tertentu. Dalam poligami terdapat dua syarat yaitu: 1. Syarat alternatif, 2. Syarat komulatif. Syarat alternatif adalah pilihan. Contoh: apabila isteri menderita cacat badan penyakit yang tidak dapat disembuhkan lagi atau isteri tidak dapat memberikan keturunan, maka diperbolehkan bagi suami untuk melakukan poligami. Di dalam Undang-Undang perkawinan disebutkan cacat badan menderita penyakit yang terus menurun dalam konteks bisa dalam keadaan fisik atau fisiknya, maka hal ini diperbolehkan untuk suami berpoligami atau isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri ini juga merupakan alasan diperbolehkannya mengajukan permohonan poligami. Jika dari alasan-alasan dan syarat untuk berpoligami tidak ada yang dapat dipenuhi oleh suami, maka poligami adalah suatu hal yang menimbulkan pertanyaan, apakah poligami poligami dilakukan hanya untuk senang-senang dan hanya berlandaskan nafsu dari suami saja. Poligami seperti ini yang salah dan tidak dibenarkan. Seperti apa yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 3 disebutkan kata adil di dalamnya, apabila kamu tidak dapat dan mampu untuk berlaku adil maka jangan lakukan ada penekanan di dalam sebuah anjuran dalam ayat ini, yang artinya sudah dapat digambarkan jika berlaku adil bukan perkara yang mudah cukuplah untuk beristeri seorang saja. Bahkan ada sebagian orang yang berpendapat dalam ayat ini jika nominal angka yang disebutkan dalam ayat tersebut untuk dijumlahkan akumulatifnya yaitu  $2+3+4=9$ , anggapan seperti ini adalah interpretasi tafsiran yang salah.

Dan ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh sendiri memandang terkait poligami yaitu jika poligami harus dilihat secara hukum agama Islam dan hukum positif negara Indonesia jelas diperbolehkan, sebagaimana yang telah diatur dalam al-Qur'an dan Undang-Undang serta KHI (Kompilasi Hukum Islam). Tentu diperbolehkannya poligami jika telah memenuhi alasan-alasan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan, maka nanti yang berhak memutuskan permohonan poligami tersebut adalah hakim yang berwenang dipengadilan agama. Tapi tetap pada dasarnya pernikahan di Indonesia memegang asas monogami. Jika saya sendiri dihadapkan terhadap permasalahan poligami, tentu saya tidak mau untuk dipoligami sebab poligami sendiri adalah permasalahan yang berkaitan dengan perasaan dan hati ini semua bukanlah hal yang digolongkan kepermasalahan yang mudah. Di dalam al-Qur'an firman Allah SWT surat An-nisa' ayat 3 telah disebutkan batasan-batasan jumlah isteri orang yang berpoligami dan pelaksanaan poligami ini harus adil dalam praktiknya, adil yang dimaksudkan dilihat secara kosep menyeluruh yaitu adil pandangan dari suami dan pandangan isteri.

Sehingga pertanyaan pertama dalam wawancara ini menghasilkan beragam pendapat dari narasumber yang mana terdapat jawaban yang beragam namun dapat ditarik kesimpulan yaitu poligami adalah suatu hal yang diperbolehkan baik secara hukum agama Islam dan hukum positif di Indonesia, secara ketentuan dan pelaksanaanya telah ditulis dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3, Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam Undang-Undang perkaawinan Nomer 1 Tahun 1974, dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) dalam pasal 55-59.

Baik alasan dan syarat-syarat yang ditetapkan haruslah dipenuhi bagi seseorang yang berkeinginan poligami, adanya poligami bukanlah sebuah anjuran melainkan toleransi dalam hubungan rumah tangga yaitu sebagai jalan alternatif yang dapat ditempuh dalam kondisi darurat. Karena pada dasarnya prinsip asas pernikahan di negara Indonesia adalah asas pernikahan monogami.

2. Tanggapan serta pandangan bapak/ibu terhadap Pasal 4 ayat 2 dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 yang menyebutkan jika cacat badan dapat mendorong seorang suami untuk mengajukan permohonan poligami kepada pengadilan, sehingga secara tidak langsung telah memberikan celah kepada suami untuk melakukan poligami?

Jawaban: Pandangan mengenai pasal tersebut adalah hal-hal yang menyebutkan akan alasan-alasan untuk diperbolehkannya melakukan poligami seperti apa yang dituturkan oleh bapak Khoirul Abror dan H Muhammad zaki, dijelaskan lebih lanjut oleh pak Khoirul Abror menyatakan sebagaimana telah tertulis dalam pasal tersebut alasan-alasan atau hal yang harus diajukan kepada pengadilan untuk orang-orang yang berkeinginan poligami dan juga telah dituliskan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dari pasal 55 sampai dengan pasal 59 akan hal serupa untuk seseorang yang berkeinginan berpoligami. Dan pasal 116 dalam KHI juga disebutkan bagi orang-orang yang akan mengajukan perceraian karena cukup akan alasan yaitu: berzina, cacat badan, dipenjara lebih dari 5 tahun, hilang tanpa ada kabar dan lain-lainnya. Ini merupakan alasan untuk bercerai bukan cacat badan untuk bercerai tetapi untuk berpoligami boleh-boleh saja jika cacat badan ini sendiri untuk



melatarbelakangi berpoligami, tentu dengan tidak menyampingkan syarat dan alasan ketentuan untuk berpoligami itu sendiri. Berbicara akan pasal 4 dalam Undang-Undang Perkawinan pak H Muhammad Zaki dan Khoirul Abror sependapat dan setuju sebab pasal tersebut dibuat dan tertulis sebagai hal-hal apa saja yang dapat melatarbelakangi bakal dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan poligami, karena baik poligami maupun perceraian haruslah ada alasan-alasan tertentu untuk dapat dikabulkannya permohonan tersebut maka pasal inilah yang nantinya bakal bisa dijadikan dasar hukum bagi seseorang yang berkeinginan berpoligami apa yang diungkapkan pak Khorul Abror. Ditambahkan oleh pak H Muhammad Zaki jika pembentukan pasal ini merupakan hal yang telah dipertimbangkan matang-matang ketika merumuskan Undang-Undang dan pasalnya, karena terkadang isteri dalam keadaan sehat baik-baik saja serta dapat melayani suaminya, sang suami terbenak keinginan untuk berpoligami apalagi dalam kasus ini kondisi isteri mengalami cacat badan baik secara lahiriyah atau batiniahnya. Namun tidak semua suami memiliki pemikiran demikian. Karena aturan-aturan alasan dalam pasal 4 Undang-Undang Perkawinan dibentuk tentu ada maksud tersendiri atas pembentukannya salah satunya yaitu untuk menghindari dosa besar seperti fitnah dan zina yang dibuat oleh sang suami dikarenakan main belakang dengan wanita lain yang disembunyikan dari sang isteri, maka dibuatlah aturan yang tegas dan tertulis sebagai dasar hukum di dalam Undang-Undang Dasar. Serta beliau memberikan nasehatnya kepada kaum perempuan semestinya menyadari kondisinya dalam artian sadar jika dirinya sudah tidak mampu

menjalankan kewajiban untuk sang suami dikarenakan cacat badan atau menderita suatu penyakit yang tidak dapat disembuhkan lagi.

Lain hal dengan pendapat yang diungkapkan oleh bapak H. Mundzir HZ dan ibu Hj Linda Firdawaty, yang berpendapat jika pasal 4 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 ini merupakan sebuah produk hukum yang dibentuk dalam Undang-Undang. Sudah sejatinya sebagai masyarakat dalam suatu negara harus patuh terhadap hukum yang ada dalam negara tersebut dan memaklumi segala ketentuan yang ada. Pak H Mundzir HZ menambahkan jika bicara terkait Undang-Undang Perkawinan terhadap pasal-pasalnya terlebih akan pasal 4 ini merupakan salah satu penjabaran dari surat An-Nisa ayat 3, karena di dalam Undang-Undang tersebut merupakan hasil dari *ijma'* kesepakatan yang di belakanginya dan diilhami dengan ilmu-ilmu fiqih dalam agama Islam dan dibentuknya Undang-Undang Perkawinan merupakan alat sebagai acuan dalam mengatur hukum perdata di bidang kekeluargaan.

Serta pandangan bapak Jayusman mengenai pasal ini yang lebih fokus membahas dalam konteks Cacat badan yang diderita oleh seorang istri dapat memberikan celah kepada suami untuk berpoligami tentu saja cacat yang menghalangi istri melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri dan demi kemaslahatan rumah tangga keduanya. Ketika istri menderita cacat yang mengganggu keharmonisan rumah tangganya yang menghalangi istri melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri (baik cacat itu terjadi ataupun diketahui setelah menikah) maka kiranya demi pertimbangan kemaslahatan suami diberikan peluang untuk berpoligami.

Berbeda dengan pendapat-pendapat yang ada ibu Hj. Zuhraeni memberikan pandangan serta penilaiannya terhadap pasal 4 Undang-Undang Perkawinan Nomer 1 Tahun 1974 beliau memaparkan bahwa pasal ini ada merupakan sebagai aturan normatif, dalam aturan normatif lagi-lagi kita harus berbicara membaca teks dan melihat secara konteksnya ketika dikontekskan dengan kondisi hukum keluarga perspektif hukum di Indonesia. Haruslah memandang hukum tersebut keberadaannya berada di tengah-tengah masyarakat artinya apakah masyarakat tersebut menghedaki budaya poligami atau tidak, apabila iya jelas jawabanya silahkan-silahkan saja karena mereka sendiri di lingkungannya tidak bertentangan akan poligami, tapi jika masyarakat tersebut mengatakan tidak maka mereka adalah kelompok yang memandang anti terhadap poligami. Dari sini dapat diambil sebuah gagasan poligami merupakan hal yang diperbolehkan tetapi dilakukan dengan tidak sembarangan. Dalam membaca Undang-Undang perspektif jangan hanya membaca dengan teks yang ada tetapi bagaiman kita juga membaca secara konteks dalam Undang-Undang tersebut di tengah-tengah masyarakat. Serta jangan salah anggapan karena pada dasarnya pernikahan berperinsip monogami bukan poligami, poligami merupakan aturan toleransi dalam ajaran agama Islam yang diatur dalam al-Qur'an dan dibuat Allah SWT untuk umatnya.

Dari pertanyaan kedua, tanggapan narasumber mengenai pasal 4 Undang-Undang Perkawinan Nomer 1 Tahun 1974 dapat ditarik kesimpulan, jika hendak berbicara terhadap pasal dan Undang-Undang sebagai masyarakat dalam suatu negara hendaklah patuh dan taat terhadap aturan yang ada dalam

negara tersebut, karena Undang-Undang merupakan produk hukum yang sudah dimusyawarahkan dan dipertimbangkan secara matang-matang ketika akan dirumuskan. Adanya Undang-Undang Perkawinan dan ketentuannya dari pasal 4 ini merupakan alasan-alasan yang dibentuk agar suami dapat menjadikannya sebagai alasan untuk mengajukan permohonan poligami kepada pihak pengadilan agama. Dalam membaca Undang-Undang hendaklah dilihat secara teks dan konteks dengan apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

3. Apa saja yang menjadi kriteria cacat badan sehingga dapat mendorong suami untuk berpoligami dalam hubungan rumah tangga, menurut bapak/ibu?

Jawaban: Pendapat bapak Khoirul Abror terkait kriteria cacat badan sebagai alasan poligami yang dimaksud disini ialah cacat badan yang diderita oleh isteri secara fisik yaitu cacat dalam artian yang sebenarnya seperti lumpuh total dan ada pula cacat badan yang tidak terlihat secara fisik luar yaitu cacat badan kelainan pada alat reproduksi atau alat kelamin sehingga dapat mengganggu hubungan antara suami isteri. Lain hal cacat badan yang menyangkut kecelakaan kecil yang diderita oleh sang isteri misalnya seperti jahiatan yang diderita isteri saat pasca melahirkan atau luka bakar percikan minyak dll yang diderita isteri pada saat memasak, maka hal seperti ini tidak termasuk cacat badan yang dapat dijadikan oleh suami untuk mengajukan permohonan poligami. Karena cacat badan yang dimaksud dalam konteks disini ialah cacat badan yang diderita bukan karena disebabkan baru terjadi melainkan setelah menikah sang suami baru lah mengetahui persoalan-persoalan yang

dirahasiakan oleh sang isteri sehingga dikawatirkan kedepannya dapat mengganggu jalannya keharmonisan dalam rumah tangga tersebut.

Bebeda dengan bapak Khoirul Abror, pak H. Mundzir HZ menanggapi jika kriteria cacat badan dalam kaitan poligami dalam pasal ini adalah isteri cacat badan dan menderita penyakit yang jelas tidak dapat disembuhkan lagi dalam jangka waktu yang tetap maka diperbolehkan bagi suami untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana yang disebutkan baik syarat-syaratnya dan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan. Karena apabila suami yang masih memiliki hasrat seksualitas yang tinggi dan isteri tidak dapat memberikan kewajibannya kepada suami dikarenakan terhalang penyakit atau cacat badan itu sendiri, yang ditakutkan dapat memberikan dampak kerusakan yang lebih besar kepada keluarga tersebut serta dapat menimbulkan zina yang dilakukan oleh suami di belakang isteri dengan perempuan lain pastinya akan mendapatkan dosa yang besar. Tetapi hendaklah poligami dilakukan dengan cara dan ketentuan yang baik-baik karena pada intinya jangan sampai menyakiti dan mendzalimi pihak manapun.

الضَّرَّارُ وَلَا الضَّرَّارَ

*“Janganlah menyakiti orang lain dan jangan pula sampai menjerumuskan dalam bahaya”*

Kembali lagi agama Islam adalah agama yang indah. Dan Undang-Undang yang ada dan dibentuk merupakan inspirasi atau produk yang diilhami oleh fiqih Islam ataupun syariat-syariatnya.

Dalam permasalahan ini kriteria cacat badan yang dapat memperbolehkan suami untuk melakukan poligami bapak H. Muhammad Zaki, Jayusman, dan ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh. sejalan dan sependapat dengan menyebutkan

jika cacat badan yang termasuk kedalam kriteria ialah cacat badan yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga serta menghalangi isteri melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang isteri. Pernyataan tersebut diberikan contoh oleh bapak Jayusman seperti: isteri memiliki liang vagina yang pendek, isteri memiliki rahim yang tidak sempurna, dan sebagainya. Dan pak H. Muhammad Zaki mempertegas bahwasanya aturan serta alasan untuk berpoligami ini sendiri sudah jelas tertuliskan dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Ibu Hj. Linda Firdawaty turut memberikan pendapatnya dalam hal kriteria cacat badan ini yaitu cacat badan di dalam pasal 4 Undang-Undang Perkawinan artinya cacat badan ini dapat diartikan yang menyebabkan isteri tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai isteri pada intinya. Sebenarnya pendapat yang dipaparkan ini sejalan dengan pendapat-pendapat dari narasumber lainnya. Namun ibu Hj. Linda Firdawaty memberikan contoh jika cacat badan yang diderita isteri seperti: terkenan air panas, luka bakar sedikit dipergelangan tangan yang disebabkan ketika isteri memasak atau hal kecil lainnya, maka hal seperti ini tidak bisa dikategorikan sebagai cacat badan untuk alasan poligami. Dikarenakan pada nantinya pemeriksaan keputusan atas layak atau tidaknya permohonan poligami yang diajukan oleh suami tersebut, akan diputuskan oleh hakim yang memimpin jalannya persidangan.

Dan ibu Hj. Zuhraeni memiliki pendapat bahwa hal yang menyangkut ke dalam kriteria cacat badan dalam pasal 4 Undang-Undang Perkawinan Nomer 1 Tahun 1974, tentu pendapat dari masing-masing orang berbeda-beda. Cacat



badan di sini isteri tidak bisa lagi menjalankan fungsinya sebagai isteri dalam kaitan nafkah batin dan perempuan atau isteri hendaklah merasa tahu jika dirinya tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan akan hak sang suami, tapi jika cacat badan hanya sekedar tidak dapat jalan kemudian kecelakaan kecil seperti gigi patah atau luka bakar ringan dan isteri masih dapat menjalankan fungsinya sebagai isteri. Ini bukan hal yang dapat diterima untuk dijadikan alasan sebagai celah suami untuk mengajukan permohonan poligami, melainkan cacat badan di sini isteri secara fisik dan batin ia sudah tidak dapat lagi melayani suami.

Pada pertanyaan ketiga terkait pendapat kriteria cacat badan dalam pasal 4 Undang-Undang Perkawinan Nomer 1 Tahun 1974 yang dapat memberikan celah kepada suami untuk mengajukan permohonan poligami, dapat disimpulkan ialah cacat badan yang dapat mengganggu keharmonisan hubungan rumah tangga sehingga dapat menghalangi seorang isteri untuk menjalankan tugas dan kewajibannya kepada suami sebagai seorang isteri. Dan ketetapan hakimlah yang nantinya menilai serta memberikan keputusan perihal cacat badan yang diderita oleh isteri tersebut, apakah dapat dikabulkan atau tidaknya permohonan poligami yang diajukan.

4. Bapak/ibu apakah sependapat atau tidaknya terkait ungkapan “poligami merupakan jalan keluar yang harus ditempuh untuk menyelesaikan masalah dalam suatu hubungan rumah tangga”, agar dapat tetap mempertahankan konsep keharmonisan dalam rumah tangga tersebut?

Jawaban: Pendapat dari bapak Khoirul Abror mengenai ungkapan tersebut ialah beliau sependapat dan setuju akan ungkapan tersebut apa yang terkait

permasalahan dengan isteri pertama, jika solusi terbaik dalam permasalahan tersebut adalah poligami kenapa tidak. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqhiah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Yang mana artinya: “Menolak keburukan dan menarik kemaslahatan.

Mengapa demikian dikarenakan dia atau sang suami akan buruk kondisi dalam dirinya baik secara lahiriyah dan batiniahnya apabila dia harus tetap bertahan dengan perkawinan monogaminya.

Berbeda hal dengan bapak Jayusman, yang memiliki pendapat serta penilaian bahwa ungkapan itu jika dikaitkan dalam poligami merupakan hal yang dianggap sebagai jalan keluar yang harus ditempuh untuk menyelesaikan suatu masalah dalam hubungan rumah tangga; tentu harus ada klarifikasi terlebih dahulu. Karena masalah dalam rumah tangga itu banyak sekali. Jalan keluar dari masalah rumah tangga itu tentu saja berbeda-beda sesuai dengan permasalahannya. Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 4 menjelaskan bahwa seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Walaupun Undang-Undang menyatakan sedemikian, namun jika kondisi tersebut tidak mengganggu keharmonisan rumah tangga tersebut dengan kata lain suami rela atau rida dengan kondisi tersebut, maka tidak akan terjadi poligami. Tetapi jika suami tidak rela atau rida dengan kondisi tersebut, maka ia dapat mengajukan izin untuk berpoligami.

Dalam pertanyaan keempat, merupakan tanggapan mengenai apakah poligami jalan keluar yang harus ditempuh untuk menyelesaikan masalah dalam hubungan rumah tangga. Beragam jawaban yang diutarakan oleh para dosen yang menjadi narasumber dalam wawancara ini ada yang membenarkan iya dan ada yang berpendapat dengan jawaban tidak yang secara langsung tidak sependapat atau tidak membenarkannya, sebagian dosen yang membenarkan pendapat jika benar bahwasanya poligami adalah solusi atau jalan yang harus diambil dalam kondisi darurat jika rumah tangga tersebut mendapat masalah yang besar dan rumit maka jika poligami lah jalan yang harus ditempuh jelas dibenarkan. Sedangkan sebagian narasumber yang kontara perihal masalah poligami beranggapan poligami adalah hal yang sulit untuk dilakukan oleh suami dan hal yang tidak dapat diterima oleh sang isteri dengan apapun alasannya, karena menilai banyak cara untuk menyelesaikan suatu masalah dalam rumah tangga dengan tidak menempuh jalan poligami di samping itu poligami sendiri akan menimbulkan dampak yang besar baik untuk keduanya, anak-anak, keluarga, serta bagi lingkungan sekitarnya. Maka haruslah terjalin komunikasi yang baik antara suami dan isteri.

5. Bagaimana pandangan serta penilaian bapak/ibu terhadap seseorang atau keluarga yang melakukan praktik poligami dalam kehidupan rumah tangganya?

Jawaban: Dalam jawaban akan pertanyaan ini bapak H. Muhammad Zaki, Khoirul Abror, H. Mundzir HZ hampir sependapat terkait pandangan terhadap orang yang berpoligami ataupun keluarga yang telah melaksanakan praktik

poligami dalam hubungan rumah tangganya yaitu balik lagi tergantung dengan apa yang melatarbelakanginya untuk melakukan poligami jika hanya semata-mata karena untuk kepuasan seks semata jelas tidak setuju dan tidak dibenarkan akan hal tersebut baik apapun alasannya, tetapi apabila orang yang berpoligami tersebut ingin menyelamatkan seseorang atau memang pada dasarnya sang isteri pertamalah yang meperkenankannya untuk berpoligami dikarenakan ia sadar bahwa dirinya sudah tidak memungkinkan lagi untuk menjalankan kewajibannya sebagai isteri atau dikarenakan ia tidak dapat memberikan keturunan kepada sang suami dikarenakan menyangkut perihal cacat badan yang isteri alami, jelas ini hal yang sah-sah saja dan diperbolehkan. Pak H. Mundzir HZ menambahkan tentu menilai orang lain bukan lah hak beliau dikarenakan hal tersebut sesuatu yang amat subjektif, tetapi terlepas diperbolehkannya poligami dalam hal ini tentu tetap untuk diharapkan agar dapat mendatangkan kemaslahatan bagi keluarga tersebut dalam pelaksanaan poligami ini sendiri dikemudian harinya. sebab di dalam agama Islam mudah dan penuh toleransi di dalamnya tetapi bukan untuk di akal-akali atau untuk dipermudah akan hukum allah yang sudah ada ini. Dan bapak H. Muhammad Zaki juga mempertegas pendapatnya dengan mengungkapkan, ada poligami yang dapat dihukum dengan kata haram, jika pria yang berpoligami ini sebelumnya telah memiliki isteri dan anak-anak yang ditelantarkan dan terbengkalai dalam kehidupan sehari-harinya, maka poligami macam inilah yang salah dan tidak dibenarkan apalagi untuk dianjurkan. Kedua poligami bisa dinilai dengan kata makruh karena sebab dari poligami tersebut dapat

menimbulkan banyak mudhorotnya dari pada kemaslahatnya. Contoh: Ada seorang tokoh agama yang pada awalnya diikuti oleh para jamaatnya atau masyarakat, pada saat tokoh ini melakukan poligami masyarakat serentak mencemoohnya sehingga banyak ditinggalkan oleh para jamaat dakwahnya. Maka poligami seperti inilah yang makruh dikarenakan menimbulkan kerugian bagi dakwah agama Islam disebabkan pelaksanaan poligami tersebut hanya dilandasi dengan hasrat nafsu peribadi saja. Terlepas dari ini semua beliau mengatakan, jika ia bukanlah seorang penganjur akan poligami, walau beliau menganggap poligami adalah hal yang diperbolehkan ketika diperlukan dalam artian beliau “membenarkan poligami tapi tidak untuk menganjurkannya”.

Berbeda dengan pendapat pak Jayusman, terkait penilaian serta pandangan terhadap seseorang atau keluarga yang mempraktikkan poligami dalam hubungan rumah tangga. Sekali lagi poligami itu bagian dari syari'at Islam. Poligami boleh ditempuh oleh seseorang ketika yang bersangkutan dalam kondisi tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu pula. Selama ia memenuhi kriteria tersebut ia dapat berpoligami. Islam melegalkan poligami dan melarang praktik perzinaan dan perselingkuhan.

Tak luput juga ibu Hj. Linda Firdawaty menuturkan bahwa orang ataupun keluarga yang melaksanakan poligami, memang pada dasarnya naluri lelaki berkeinginan untuk berpoligami, meskipun isterinya dalam keadaan sehat serta dapat melayaninya dengan baik dan telah memiliki keturunan. Tetapi ketika suami melihat perempuan lain yang dianggapnya melebihi sang isteri pasti

akan timbul keinginan-keinginan kecil untuk berpoligami, kembali lagi pada kondisi masing-masing jika poligami dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan seksualitas atau hasrat nafsu saja supaya memudahkannya agar tidak berbuat maksiat, maka ini bukanlah hal yang dibenarkan dalam poligami. Karena konsekuensi dari poligami ini bukanlah hal yang mudah, mampu untuk berbuat adil, mampu menafkahi baik secara lahir dan batinnya dan hal-hal seperti ini bukan perkara yang mudah pastinya akan menambah tanggung jawab lebih besar kepada suami tersebut. Terkadang mata lelaki hanya memandang serta memikirkan apa yang dianggapnya senang dan indah saja dengan menyampingkan hal buruk nanrumit dikemudian hari. Jadi jika berkeinginan untuk poligami silahkan saja jika memang siap menanggung segala resiko dikedepan harinya, tapi jika pendapat saya isteri pertama tidak akan mau atau tidak akan mudah mengiyakan suaminya untuk berpoligami apabila tidak dalam kondisi darurat atau dalam posisi isteri mengalami penyakit atau cacat badan. Sekali lagi poligami adalah hal yang sah-sah saja dan jelas diperbolehkan dengan melihat apa yang melatarbelakanginya untuk berpoligami.

Ibu Hj. Zuhraeni menilai terhadap orang atau keluarga yang mempraktikkan poligami dalam kehidupan rumah tangganya, praktik poligami berbiacara menyangkut hal konteks serta ditinjau dari prinsip-prinsip yang melatarbelakanginya untuk berpoligami. Jika poligami dilakukan berangkat dari prinsip kata adil dan untuk kelangsungan jalannya keluarga tersebut untuk bahagia dan sejahtera tentu itu merupakan hal yang dapat disetujui,

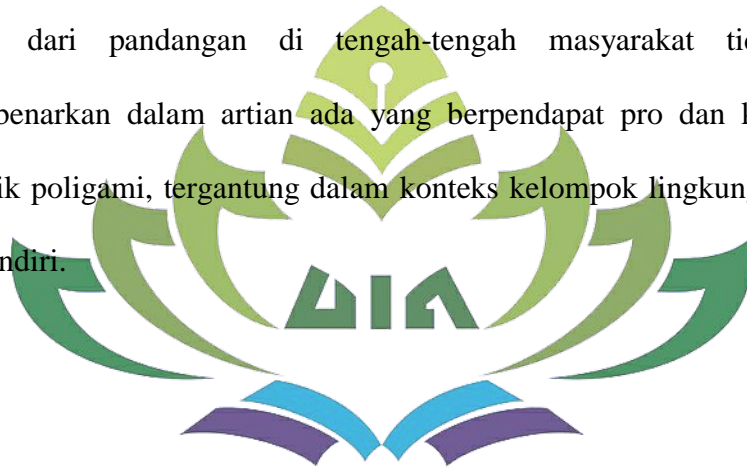


sebab suami dapat mengimbangi rasa antara isteri pertama dan isteri keduanya dan ini banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dan jika poligami yang dilakukan berakibatkan ke dalam hal yang mengenaskan maka ini adalah praktik poligami yang salah, artinya setelah ia berpoligami isteri pertama dikorbankan dan diacuhkan, tidak dinafkahi serta ditelantarkan. Maka dengan poligami yang seperti ini saya tidak setuju sebab terjadinya poligami seperti ini karena diawali dengan niatan yang salah dan tidak benar. Apabila kita melarang dengan mutlak poligami juga itu hal yang salah, adanya poligami harus disertai dengan alasan-alasan tertentu yaitu salah satunya cacat badan penyakit yang tidak dapat disembuhkan lagi di dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia telah diatur secara ketentuannya.

Dan pendapat serta penilaian dari ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh terhadap perkara praktik poligami adalah permasalahan yang tidak ada habisnya untuk dibahas, apalagi jika dihadapkan di tengah-tengah keadaan masyarakat. Akan timbul banyak sekali penilaian serta pembahasan di dalamnya, ada sebagian yang pro dan kontra, dari semua ini baik secara penilaian dan pandangan terhadap poligami mari dilihat kontekstual secara pelaksanaan, baik secara alasan-alasan, syarat-syarat apakah sudah benar terpenuhi semuanya dan dihadapkan dalam kondisi apa sehingga sampai suami tersebut memutuskan untuk melaksanakan poligami. Maka baru kita dapat menilai dalam praktiknya diperbolehkan atau tidaknya.

Dan dari pertanyaan kelima ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa penilaian dari para narasumber mengenai seseorang atau keluarga yang melakukan

praktik poligami dalam kehidupan rumah tangganya. Dalam menilai dan memberikan pendapat terhadap praktik poligami haruslah dilihat secara kontekstual serta ditinjau dari prinsip apa yang melatarbelakangi seorang suami tersebut sehingga melakukan poligami, barulah dapat disimpulkan apakah poligami tersebut dalam peraktiknya benar diperbolehkan atau tidak. Karena walaupun poligami adalah hal yang diperbolehkan tetapi tidak semua poligami dapat dibenarkan sebab terdapat alasan dan syarat-syarat yang harus terpenuhi sebelum pelaksanaannya. Disamping itu penilaian terhadap poligami juga tak luput dari pandangan di tengah-tengah masyarakat tidak semuanya membenarkan dalam artian ada yang berpendapat pro dan kontra terhadap praktik poligami, tergantung dalam konteks kelompok lingkungan masyarakat itu sendiri.



## BAB IV

### ANALISIS DATA

#### A. Pandangan Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Tentang Cacat Badan sebagai Alasan Poligami

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan di fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung seperti apa yang telah dipaparkan dalam BAB III dan merujuk pada BAB II sebagai landasan teori, poligami merupakan hal yang diperbolehkan dalam agama Islam, namun secara pelaksanaan poligami ini sendiri haruslah sesuai dengan alasan-alasan yang ditetapkan dan memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan al-Quran. Yang disebutkan dalam firman Allah SWT surat an-Nisa' ayat 3, yaitu:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا.

Artinya : "Dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.

Permasalahan poligami ini sendiri masih menjadi suatu polemik keberadaanya di tengah-tengah masyarakat terlebih di mata kaum wanita. Karena poligami dipandang secara umum hanya akan memecah keutuhan keluarga. Namun poligami juga bukanlah hal yang dilarang dalam agama Islam maupun Undang-Undang Perkawinan. Tetapi harus dengan memenuhi syarat-syarat dan

pelaksanaan poligami sesuai dengan alasan-alasan dari poligami ini sendiri sebagaimana yang telah ditetapkan di dalamnya.

Sebagaimana yang telah tertulis di dalam pasal 4 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, terdapat tiga poin yang menyebutkan alasan-alasan suami dapat dibenarkan untuk beristeri lebih dari seorang atau poligami.

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.

Alasan ini memang bisa dibenarkan sebab salah satu tujuan perkawinan adalah memenuhi hak-hak pasangannya, maka dengan tidak dapatnya isteri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, ini berarti hak-hak suami dalam rumah tangga tidaklah terpenuhi.

2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

Alasan ini adalah termasuk salah satu yang dapat dibenarkan secara pengertiannya walaupun secara tekstual adanya alasan ini ada berdasarkan alasan kemanusiaan sebab bagi suami tentu saja akan selalu menderita lahir batin selama hidupnya apabila hidup bersama dengan isteri yang mengalami keadaan dalam kondisi demikian. Oleh karena itu isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan lagi dapat memperbolehkan suami untuk mengajukan poligami kepada pengadilan agama, dari pada menceraikan isterinya yang sedang dalam penderitaan dan membutuhkan pertolongan dan perlindungan dari seorang suami dan dalam kondisi ini juga dikawatirkan suami melakukan perbuatan zina di belakang isteri, maka atas alasan inilah merupakan salah satu solusi yang dapat ditempuh oleh seorang suami untuk berpoligami.

### 3. Isteri tidak dapat melahikan keturunan.

Alasan ini juga dibuat adalah alasan yang amat sangat wajar, sebab memperoleh keturunan adalah merupakan salah satu tujuan dari perkawinan itu sendiri.

Seperti tanggapan beberapa narasumber mengenai cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan sebagai alasan suami untuk melakukan poligami, yaitu adalah hal yang diperbolehkan dan merupakan sesuatu yang dibenarkan dalam Undang-Undang perkawinan No 1 Tahun 1974 untuk dijadikan sebagai alasan oleh suami untuk melakukan poligami terhadap isterinya. Karena jelas hal cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan termasuk ke dalam alasan-alasan suami dapat melakukan poligami sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.

Hampir sebagian narasumber menyetujui dengan adanya alasan cacat badan termasuk ke dalam alasan-alasan yang dapat dibenarkan suami untuk berpoligami, namun cacat badan dalam hal ini termasuk ke dalam kriteria artian cacat badan yang sebenar-benarnya sebagaimana yang telah tertulis di dalam Undang-Undang. Tetapi ada beberapa narasumber yang tidak menyetujui perihal cacat badan semata-mata untuk dijadikan alasan suami dapat dengan mudah mengajukan permohonan poligami kepada pengadilan agama, diantaranya yaitu ibu Hj. Linda Firdawaty dan ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh lantaran mereka memiliki pandangan serta pendapat yang berbeda dari sudut pandangan perempuan khususnya, ibu Hj. Linda Firdawaty menilai pada dasarnya naluri lelaki berkeinginan untuk melakukan poligami meskipun isteri dalam keadaan

yang sehat-sehat saja dan telah melahirkan keturunan, karena dipengaruhi oleh nafsu akan ketidakpuasan terhadap apa yang telah dicapai atau dimiliki seorang suami tersebut. Dan ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh berpendapat bukan lah hal yang mudah jika perempuan harus dihadapkan terhadap permasalahan poligami walaupun poligami terjadi lantaran isteri mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, karena masalah poligami menyangkut hati dan perasaan, ibu Yufi menilai jika bukan perkara mudah untuk perempuan manapun dapat mengikhlaskan dirinya dipoligami, terlebih ia sendiri apapun itu hal yang dapat dijadikan alasan bagi suami untuk berpoligami. Jika alasan suami berpoligami hanya dikarenakan oleh nafsu syahwat, poligami bukanlah suatu alasan yang tepat melainkan bukan karena alasan-alasan yang jelas serta dibenarkan. Sebenarnya hal ini sejalan dengan anggapan pendapat dari para narasumber lainnya, mereka menyetujui adanya poligami lantaran disebabkan isteri mengalami cacat badan melainkan arti cacat badan yang telah sesuai dengan arti cacat badan yang sebenar-benarnya. Baik secara hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan, yang mana secara hukum Islam ketentuan poligami ada di dalam al-Qur'an dalam surat an-Nisa' ayat 3 dan 129 serta dalam Hukum Positif di Indonesia baik secara syarat, ketentuan, dan peraturan poligami ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 yang pelaksanaanya tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 dan dikuatkan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Beristeri Lebih Dari Satu dalam pasal 55 sampai pasal 59.



Perihal cacat badan sebagai alasan poligami banyak tanggapan yang berbeda dari argumen-argumen yang diutarakan oleh para responden, seperti cacat badan yang dimaksud oleh ibu Hj. Zuhraeni, beliau berpendapat bahwa kriteria yang dimaksud cacat badan dalam permasalahan ini ialah isteri tidak bisa lagi menjalankan fungsinya sebagai isteri dalam kaitan nafkah lahir dan batin, serta sudah seharusnya timbul kesadaran dari sang isteri bahwa ia tidak bisa dan sanggup lagi untuk memenuhi kebutuhan hak suaminya. Dalam hal ini isteri secara fisik lahir dan batinnya sudah tidak dapat melayani suami. Sedangkan beberapa responden lainnya mereka mengatakan cacat badan dalam permasalahan ini ialah cacat badan yang dapat mengganggu keharmonisan dalam hubungan rumah tangga, sehingga cacat badan di sini menghalangi seorang isteri untuk menjalankan tugas dan kewajibannya kepada suami sebagai isteri. Seperti yang dijelaskan oleh beberapa narasumber antara lain bapak Jayusman, bapak H. Muhammad Zaki, Khoirul Abror, H. Mundzir HZ dan yang lainnya. Cacat badan sebagai alasan poligami sebenarnya dibuat dan dibentuk dengan maksud tujuan untuk salah satu alasan yang dapat diambil atau ditempuh oleh seorang suami dalam kondisi mendesak, untuk mengajukan permohonan poligami dihadapan pengadilan agama.

Karena poligami pada zaman sekarang membawa banyak kemudharatan dari pada kemaslahataannya, banyak poligami yang dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan laki-laki saja, seperti memenuhi hasrat jasmani, dan mencari kepuasan nafsu semata. Begitu juga untuk para perempuan yang mau dipoligami, jika mereka rela dipoligami bukan karena membutuhkan sosok

seorang suami yang bisa mengayomi, dan menjadi imam dalam keluarga tetapi hanya karena masalah materil saja. Seperti banyak kasus yang terjadi disekitar kita yang dituturkan ibu Hj. Linda Firdawaty, Hj. Zuhraini dan narasumber yang lainnya menurut hasil pengamatan di tengah-tengah fakta kehidupan masyarakat. Tetapi tidak semua pelaku poligami berlandaskan karena hal tersebut, ada juga beberapa pelaku poligami yang cukup alasan dan syarat-syarat sehingga dapat dibenarkan tindak praktik poligaminya.

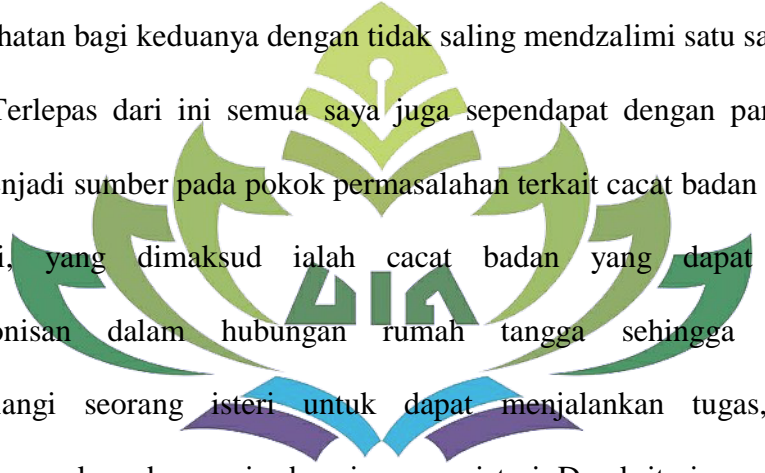
Menurut saya sendiri cacat badan sebagai alasan poligami adalah merupakan salah satu dari beberapa alasan yang dibentuk dan dikukuhkan secara tertulis di dalam pasal 4 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, untuk dijadikan alasan bagi suami yang memiliki keinginan beristeri lebih dari seorang. Sebagaimana bunyi dalam pasal 4 ayat 2 tersebut:

(2) Pengadilan hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Seperti yang terkait pembahasan dalam skripsi ini yaitu poin b Isteri mendapat cacat badan, menurut saya ini adalah salah satu alasan yang dapat dibenarkan secara pengertiannya melainkan jika dilihat secara tekstual “isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan” ada dan munculnya berdasarkan alasan kemanusiaan, sebab bagi suami tentu saja akan selalu menderita lahir dan batin selama hidupnya apabila hidup bersama dengan isteri

yang mengalami keadaan kondisi demikian. Oleh karena itu isteri yang mendapat cacat badan untuk dapat memperbolehkan suami mengajukan permohonan poligami kepada pengadilan agama, dari pada harus menceraikan isterinya yang sedang dalam penderitaan dan membutuhkan pertolongan dan perlindungan dari seorang suami sebab dalam kondisi ini juga dikawatirkan suami dapat melakukan perbuatan zina di belakang isteri lantaran tidak terpenuhi akan hak-hak suami atau malah mendatangkan dampak kemudharatan yang lebih besar bagi keduanya. Maka dengan solusi demikian diharapkan dapat mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya dengan tidak saling mendzalimi satu sama lain.



Terlepas dari ini semua saya juga sependapat dengan para narasumber yang menjadi sumber pada pokok permasalahan terkait cacat badan sebagai alasan poligami, yang dimaksud ialah cacat badan yang dapat mengganggu keharmonisan dalam hubungan rumah tangga sehingga menyebabkan menghalangi seorang isteri untuk dapat menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya kepada suami sebagai seorang isteri. Dan kriteria cacat badan dapat memberikan celah kepada suami untuk mengajukan permohonan poligami adalah kasuistik, yaitu kembali melihat kepada kondisinya. Apabila isteri pemohon menderita cacat badan, maka harus dilihat bagaimana cacatnya, apakah cacat badan yang diderita menghalangi isteri tersebut untuk melaksanakan kewajibannya.

Dalam hal ini menderita cacat badan maka permohonan poligami yang diajukan haruslah disertai surat keterangan yang jelas dari para ahli medis yaitu seorang dokter, untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi hakim dalam

memberikan ketetapan yang pada akhirnya hakimlah yang menetapkan cacat badan tersebut apakah sudah benar dan dapat diperbolehkan untuk dijadikan alasan bagi suami tersebut untuk mengajukan permohonan poligami.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan paparan dan analisis yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pandangan dosen tentang cacat badan sebagai alasan poligami para dosen fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang menjadi narasumber dalam permasalahan ini sepakat, bahwa poligami merupakan hal yang diperbolehkan baik secara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia yang secara pelaksanaan, ketentuan dan peraturannya telah diatur dalam al-Qur'an dan Undang-Undang Perkawinann No I Tahun 1974. Dengan tidak menyampingkan asas pernikahan di Indonesia yang menganut paham asas pernikahan monogami, karena poligami bukan merupakan anjuran melainkan toleransi dalam hubungan rumah tangga sebagai jalan alternatif yang dapat ditempuh dalam kondisi tertentu. Sedangkan cacat badan dalam poligami merupakan alasan yang secara tertulis dicantumkan dalam pasal 4 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 untuk mengajukan permohonan poligami kepada pengadilan agama, dan hasil wawancara yang didapat dari para dosen yang menjadi narasumber sependapat cacat badan dapat dijadikan sebagai alasan poligami, namun ada beberapa dari narasumber yang tidak sependapat dan sepenilaian dikarenakan memiliki sudut pandang yang berbeda akan hal ini. Adapun kriteria cacat badan yang dapat dijadikan alasan bagi suami untuk mengajukan permohonan poligami para dosen

sependapat, bahwa cacat badan yang dapat menghalangi serta mengganggu keharmonisan dalam hubungan rumah tangga sehingga dapat menyebabkan dan mengganggu seorang isteri untuk menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya kepada suami sebagai seorang isteri.

## **B. Saran**

Setelah melakukan pembahasan dan mengambil beberapa kesimpulan maka perlu untuk memberikan saran yang mungkin ada manfaat kepada semua pihak nantinya adalah:

1. Kepada para suami yang ingin berpoligami agar dapat berpikir ulang dalam segala hal untuk melakukan poligami, karena dampak pada kehidupan yang akan datang dalam rumah tangga akan lebih besar.
2. Pengadilan agama adalah tempat orang beragama Islam yang berperkara untuk mencari keadilan yang sesuai dengan syariat Islam, oleh karena itu para hakim diharapkan dapat proposional menjalankan kewajibannya dalam menetapkan dan memutuskan perkara.
3. Pada instansi terkait perlu mengkaji dan meninjau kembali bunyi dari pasal 4 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, agar dapat diperjelas secara khusus dan terperinci dari bunyi masing-masing poin dalam pasal tersebut.
4. Kepada para suami yang akan berpoligami lantaran isteri dalam kondisi cacat badan untuk bisa lebih bersabar dalam menghadapinya dan terus berusaha melakukan upaya penyembuhan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman I Doi, Inilah Syari'ah Islam Terjemahan, *Buku The Islamic Law*, Usman Efendi AS, Abdul Khaliq. Jakarta: Pustaka Panji, 1990.
- Abdurrahman I Doi, Perkawinan dalam Syari'at Islam, *Syari'at The Islamic Law*, Terjemahan Basri Aba Asghary, Wadi Masturi. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Abidin, Slamet, H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- al-Albani, Wahbi Sulaiman Gawajji, *Sosok-Sosok Perempuan Muslim*. Bandung: Trigenda Karya, 1995.
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an, as-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan Media Utama.
- Al-Hamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam). Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Asy Syafi'i, Imam, *Musnad Imam Syafi'i Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*. Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1996.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pn Balai Pustaka, 1989.
- Engineer, Asgar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003.
- H. Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hadi, Sutrisno, *Methodologi Research*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984.

- Hakim, Muhammad Lutfi, Kursus Pra-Nikah: Konsep dan Implementasinya, Jurnal Al-Adalah (Fakultas Syari'ah, Vol. 13, No. 2 Desember 2016..
- Instruksi Presiden RI. Nomer 1 Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2001.
- Ismail, Nurjannah, *Perempuan Dalam Pasungan*. Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2003.
- J Lexy. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999.
- Kuzairi, Ahmad, Nikah Sebagai Perikatan. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Margono, Metode Penelitian Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Mu'in, Fathul, ed. Profil Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Raden Intan Lampung 2016. Lampung: Fakultas syari'ah dan Hukum IAIN Raden Intan Lampung, 2016.
- Mulia, Musbah, *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender dan Perserikatan Solidaritas Perempuan, 1999.
- Mulia, Musdah, *Memahami Keadilan dalam Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Mulia, Musdah, *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999.
- Nasution, Khoirudin, Riba dan Poligami. Yogyakarta: Academia, 1996.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Nuruddin, Aminur, Taringan, Akmal Azhari, Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2004..
- Partanto Pius A. dan Al-Barry M. Dahlan, Kamus Ilmiah Populer. Surabaya: Arkola, 1994.
- Ramadhan, Shadiq, Benarkah Poligami Terbatas Empat Saja, tersedia di: <http://www.suara-islam.com/read4956-Benarkah-Poligami-Terbatas-Empat-Saja-.html> (12 Juli 2012)
- Ridha, Muhammad Rasid, Jawaban Islam Terhadap Berbagai Keraguan Seputar Keberadaan Wanita. Surabaya: Pustaka Progresif, 1992.

- Sabiq, Sayyid, *Al Fiqih Al Sunnah* . Bairun: Daruk Fikri, 1983.
- Sastroatmojo, Arso, Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Rineka Cipta, 1988.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam . Jakarta: Liberty, 1982.
- Soerjonosoekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan ketiga. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Sugiono, Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta, 2001.
- Sugiono, Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta CV, 2011.
- Syahrani, Riduan, Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia. Bandung: Alumni, 1978.
- Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam* . Jakarta: Kencana, 2006.
- Tim Arkola, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Surabaya: Arkola, 2005.
- Tutik, Titik Triwulan, Poligami Perspektif Perikatan Nikah. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.
- Usman, Iskandar, Istihsan Dan Pembaharuan Hukum Islam. Depok: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Wawancara dengan bapak Khoirul Abror. Bandar Lampung.
- Wawancara dengan bapak H. Mundzir HZ. Bandar Lampung.
- Wawancara dengan bapak H. Muhammad Zaki. Bandar Lampung
- Wawancara dengan bapak Jayusman. Bandar Lampung.
- Wawancara dengan ibu Hj. Linda Firdawaty. Bandar Lampung.
- Wawancara dengan ibu Hj. Zuhraini. Bandar Lampung.

Wawancara dengan ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh. Bandar Lampung.

